



**ANALISIS *FRAMING* PEMBERITAAN PEMBENTUKAN
BADAN ANAK DAN KELUARGA (*KODOMO KATEICHŌ*)**

こども家庭庁の設立に関するニュースのフ

レーミング分析

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Syarat Untuk Memperoleh Gelar Strata 1
(S1) Sarjana Bahasa dan Kebudayaan Jepang

Oleh:

Aryodimas Priyo Jaguardy

NIM 13020221120005

**PROGRAM STUDI STRATA 1
BAHASA DAN KEBUDAYAAN JEPANG
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2025

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini penulis menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi ini disusun secara mandiri, tanpa menggunakan hasil penelitian yang telah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana atau diploma di universitas lain, maupun mengambil hasil penelitian pihak lain. Penulis juga menegaskan bahwa seluruh isi skripsi ini tidak memuat kutipan atau tulisan orang lain selain yang secara jelas tercantum dalam daftar rujukan dan Daftar Pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat unsur plagiarasi atau penjiplakan, penulis bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Semarang, 22 Desember 2025

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Aryodimas Priyo Jaguardy', written in a cursive style.

Aryodimas Priyo Jaguardy

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “ANALISIS *FRAMING* PEMBERITAAN PEMBENTUKAN BADAN ANAK DAN KELUARGA (*KODOMO KATEICHŌ*)” ini telah disetujui oleh dosen pembimbing dan diajukan kepada tim penguji skripsi pada 16 Desember 2025.

Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing



Dewi Saraswati Sakariah, S.S., M.Si.

NPPU. H.7.199004022021042001

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Aryodimas Priyo Jaguardy

NIM : 13020221120005

Program Studi : Bahasa dan Kebudayaan Jepang

Judul Skripsi : ANALISIS *FRAMING* PEMBERITAAN PEMBENTUKAN
BADAN ANAK DAN KELUARGA (*KODOMO KATEICHŌ*)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai salah satu persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Linguistik pada Program Studi S1 Bahasa dan Kebudayaan Jepang, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro.

Ditetapkan di : Semarang

Tanggal : 19 Desember 2025

Tim Penguji Skripsi

Ketua Penguji

Dewi Saraswati Sakariah, S.S., M.Si.
NPPU. H.7.199004022021042001

Dosen Penguji I

Nisia Nur Dwi Agusta, S.Hum., M.Si.
NPPU. H.7.199308152022042001

Dosen Penguji II

Arsi Widiandari, S.S., M.Si.
NPPU. H.7.198606112021042001



Dekan,
Fakultas Ilmu Budaya,
Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Alamsyah, S.S., M.Hum.
NIP. 197211191998021002

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

***“Karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.
Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”***

(Q.S. Asy-Syarah: 5 – 6)

***“Selalu ada harga dalam sebuah proses, nikmati saja lelah-lelah ini.
Lebarkan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk
menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu
berjalan lancar. Tapi, gelombang-gelombang itu yang nanti bisa kau
ceritakan.”***

(Boy Candra)

Skripsi ini dipersembahkan kepada kedua orang tua dan keluarga yang senantiasa memberikan dukungan dan doa kepada penulis, juga kepada segenap dosen prodi S1 Bahasa dan Kebudayaan Jepang Universitas Diponegoro. Terima kasih atas dukungan dan kepercayaannya sehingga penulis dapat sampai ke titik ini.

PRAKATA

Segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pembentukan Badan Anak dan Keluarga di Jepang: Analisis *Framing* Pemberitaan Daring”. Proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari banyaknya bimbingan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak. Maka dari itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Alamsyah, S.S., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro.
2. Zaki Ainul Fadli, S.S., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Jepang Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro.
3. Dewi Saraswati Sakariah S.S., M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan dukungan bagi penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Nur Hastuti S.S., M.Hum. selaku dosen wali yang telah memberikan arahan dan dukungan sejak awal perkuliahan.
5. Seluruh dosen Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Jepang Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmunya yang berharga sepanjang perkuliahan penulis.
6. Lestari *Family*, Ayah Koko, Mama Wiwik, Ibuk Sumiati, Kakung Samiran, Om Roni, Tante Yuli, Dio, Dika, Difano, dan Naura yang senantiasa mendoakan dan mendukung pendidikan penulis.

7. Teman-teman seperjuangan dari Prodi Bahasa dan Kebudayaan Jepang angkatan 2021 yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.
8. Teman-teman Kost D'paris, Meier, Fajar, Hafizh, Esa, dan Marsha yang selalu mengadakan pertemuan yang berkesan, seru, menyenangkan dan menjadi tempat yang nyaman bagi penulis.
9. Teman-teman iya apa iya, Faris, Marsya, Apis, Ditya, Dea, Sella, Grego, Naomi, Viril, dan Natasya yang selalu mengenalkan dunia luar yang begitu asik serta menambah pengalaman yang tak tergantikan kepada penulis.
10. Karisa Angelica Ardana Sekeon sebagai pribadi yang senantiasa hadir untuk mendukung penulis, memberikan tenaga, waktu, dan semangat selama proses penulisan skripsi ini. Terima kasih atas kesetiaan dan kebersamaan yang telah terjalin sejak semester 3 hingga karya ini selesai disusun.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih belum sempurna dan sangat terbuka pada kritik dan saran yang membangun. Penulis berharap sekiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca.

Semarang, 13 November 2025

Penulis,



Aryodimas Priyo Jaguardy

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PRAKATA	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	x
INTISARI.....	xi
ABSTRACT	xii
BAB 1.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Ruang Lingkup Penelitian.....	8
1.5 Metode Penelitian.....	8
1.6 Manfaat Penelitian.....	11
1.6.1 Manfaat Teoretis	11
1.6.2 Manfaat Praktis	12
1.7 Sistematika Penelitian	12
BAB II	14
2.1 Penelitian Terdahulu	14
2.2 Kerangka Teori	21
2.2.1 Teori <i>Framing</i> Robert N. Entman.....	21
2.2.2 Konstruksi Sosial Media Massa.....	24
2.3 Badan Anak dan Keluarga di Jepang	29
BAB III.....	32

3.1 Analisis Pemberitaan dari Asahi Shimbun	33
3.2 Analisis Pemberitaan dari Yomiuri Shimbun	63
BAB IV	93
要旨.....	94
DAFTAR PUSTAKA.....	97
LAMPIRAN	xiii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tren <i>Total Fertility Rate</i> (TFR) Jepang	3
--	---

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Model analisis Framing Robert Entman.....	24
Tabel 3.1 Analisis Pemberitaan Asahi Shimbun 1	34
Tabel 3.2 Analisis Pemberitaan Asahi Shimbun 2	38
Tabel 3.3 Analisis Pemberitaan Asahi Shimbun 3	42
Tabel 3.4 Analisis Pemberitaan Asahi Shimbun 4	46
Tabel 3.5 Analisis Pemberitaan Asahi Shimbun 5	50
Tabel 3.6 Analisis Pemberitaan Asahi Shimbun 6	54
Tabel 3.7 Analisis Pemberitaan Asahi Shimbun 7	58
Tabel 3.8 Analisis Pemberitaan Yomiuri Shimbun 1.....	63
Tabel 3.9 Analisis Pemberitaan Yomiuri Shimbun 2.....	67
Tabel 3.10 Analisis Pemberitaan Yomiuri Shimbun 3.....	71
Tabel 3.11 Analisis Pemberitaan Yomiuri Shimbun 4.....	75
Tabel 3.12 Analisis Pemberitaan Yomiuri Shimbun 5.....	79
Tabel 3.13 Analisis Pemberitaan Yomiuri Shimbun 6.....	83
Tabel 3.14 Analisis Pemberitaan Yomiuri Shimbun 7.....	87

INTISARI

Aryodimas Priyo Jaguardy. 2025. “Analisis *Framing* Pemberitaan Pembentukan Badan Anak dan Keluarga (*Kodomo Kateichō*).” Skripsi. Program Studi S-1 Bahasa dan Kebudayaan Jepang, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro. Dosen Pembimbing: Dewi Saraswati Sakariah, S.S., M.Si.

Penelitian ini mengkaji bagaimana media massa di Jepang membingkai pemberitaan mengenai pembentukan Badan Anak dan Keluarga (*Kodomo Kateichō*), sebuah lembaga baru yang resmi berdiri pada April 2023 sebagai respons pemerintah terhadap krisis demografis (*shōshika*), meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak, serta perlunya koordinasi kebijakan anak dan keluarga secara terpadu. Kajian ini berangkat dari asumsi bahwa media massa berperan sebagai agen konstruksi realitas sosial yang tidak netral dalam memaknai kebijakan publik.

Penelitian ini menggunakan teori *framing* Robert N. Entman yang mencakup empat elemen analisis, yaitu *define problems*, *diagnose causes*, *make moral judgement*, dan *treatment recommendation*. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan analisis teks media. Data primer diperoleh dari 14 artikel berita daring, masing-masing tujuh artikel dari Asahi Shimbun dan Yomiuri Shimbun, yang diterbitkan dalam rentang waktu April 2023 hingga pertengahan 2025. Pemilihan kedua media didasarkan pada perbedaan orientasi ideologis, yakni Asahi Shimbun yang berhaluan progresif liberal dan Yomiuri Shimbun yang berhaluan konservatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Asahi Shimbun membingkai *Kodomo Kateichō* secara kritis dan reflektif dengan menyoroti hambatan struktural, ketimpangan gender, kualitas kebijakan pengasuhan, serta tanggung jawab moral negara terhadap kesejahteraan anak dan keluarga. Sebaliknya, Yomiuri Shimbun menampilkan *framing* afirmatif dan pragmatis dengan menekankan efisiensi administratif, stabilitas sosial, serta dukungan terhadap kebijakan pemerintah sebagai upaya menjaga ketahanan keluarga dan masyarakat.

Perbandingan *framing* kedua media memperlihatkan bahwa ideologi media berperan signifikan dalam membentuk makna kebijakan publik. Asahi Shimbun mendorong transformasi sosial melalui kritik konstruktif, sementara Yomiuri Shimbun memperkuat legitimasi negara melalui pemberitaan yang menekankan keberhasilan kebijakan. Penelitian ini menegaskan bahwa media massa tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai aktor ideologis yang membentuk persepsi publik terhadap kebijakan sosial di Jepang.

Kata kunci; *Kodomo Kateichō*; media massa; analisis *framing*; Jepang.

ABSTRACT

Aryodimas Priyo Jaguardy. 2025. “Analisis Framing Pemberitaan Pembentukan Badan Anak dan Keluarga (*Kodomo Kateichō*).” Undergraduate Thesis. Japanese Language and Culture Study Program, Faculty of Humanities, Diponegoro University. Advisor: Dewi Saraswati Sakariah, S.S., M.Si.

This research examines how Japanese mass media frame news coverage regarding the establishment of the Children and Families Agency (*Kodomo Kateichō*), a new government body inaugurated in April 2023 as a policy response to Japan’s demographic crisis (*shōshika*), the increase in child abuse cases, and the need for cross ministerial coordination in family and child welfare policies. The study applies Robert N. Entman’s framing theory, which consists of four analytical elements: define problems, diagnose causes, make moral judgement, and treatment recommendation.

This research employs a qualitative descriptive method with a media text analysis approach. The data consist of fourteen online news articles seven from Asahi Shimbun and seven from Yomiuri Shimbun published between 2023 and 2025. These newspapers were selected based on their contrasting ideological orientations: Asahi Shimbun represents a progressive liberal perspective, while Yomiuri Shimbun reflects a conservative and pro government stance.

The findings indicate that Asahi Shimbun frames *Kodomo Kateichō* in a critical progressive manner by emphasizing structural barriers, social inequality, gender issues, and the need for reform oriented policies that prioritize family and child welfare beyond administrative measures. In contrast, Yomiuri Shimbun adopts an affirmative conservative framing that highlights administrative achievements, family responsibility, and the role of the government in maintaining social stability and policy effectiveness. These differences demonstrate that media ideology plays a significant role in shaping how public policies are framed and interpreted, confirming that mass media function not only as information providers but also as ideological actors in contemporary Japanese society

Keywords; *Kodomo Kateichō*; mass media; framing analysis; Japan.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada April 2023, pemerintah Jepang secara resmi membentuk lembaga baru bernama Badan Anak dan Keluarga (*Kodomo Kateichō*). Lembaga ini diajukan dan disahkan oleh Diet Jepang pada bulan Juni 2022 sebagai tanggapan atas krisis kependudukan, salah satunya adalah penurunan angka kelahiran (*Shōshika*). Dilansir dari laman berita Jiji Press News dengan judul artikel (*Kodomo Kateichō 23 nen dō sōsetsu sefu tatewarikaishō e kihonhōshin hoikusho kodomo en o ikan*). Menyatakan bahwa, badan ini berada langsung di bawah *Cabinet Office* dan bertujuan menjadi badan utama atas berbagai kebijakan yang menangani isu-isu seperti penurunan angka kelahiran (*Shōshika*), dukungan terhadap keluarga yang memiliki anak, serta pencegahan perundungan dan pelecehan anak yang sebelumnya ditangani oleh berbagai kementerian dan lembaga pemerintah (Press, 2023).

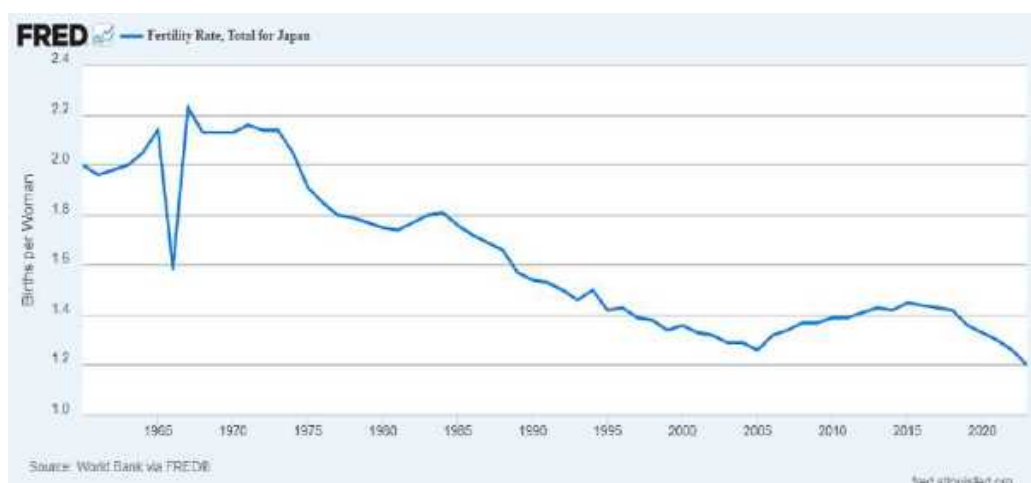
Keputusan kabinet Jepang pada 21 Desember 2021 menandai langkah penting dalam konsolidasi kebijakan anak yang sebelumnya tersebar di berbagai kementerian dan lembaga. Selain anak, keluarga juga menjadi elemen yang tak terpisahkan dalam pembahasan kebijakan sosial di Jepang. Keluarga dipandang sebagai unit fundamental yang menentukan kualitas tumbuh kembang anak sekaligus stabilitas sosial masyarakat. Oleh sebab itu, kebijakan yang hanya berfokus pada anak tanpa mempertimbangkan kondisi keluarga berpotensi tidak efektif, karena anak selalu berada dalam lingkup keluarga yang memengaruhi kehidupannya sehari-hari. Dokumen kebijakan dasar pembentukan Badan Anak dan Keluarga (*Kodomo Kateichō*) menegaskan bahwa pendekatan baru ini

dirancang untuk mengatasi fragmentasi administratif dan memastikan bahwa isu anak tidak dipisahkan dari kondisi keluarga secara keseluruhan, melainkan ditangani melalui kebijakan terpadu yang bersifat lintas kementerian (Cabinet Secretariat, 2021).

Badan Anak dan Keluarga (*Kodomo Kateichō*) dibentuk dengan tujuan untuk memperkuat kepentingan terbaik anak, mewujudkan masyarakat berpusat pada anak, serta mengatasi problem struktural berupa tumpang tindih kewenangan antar instansi melalui koordinasi di bawah satu lembaga administratif independen. Atas dasar itu, dibentuklah Badan Anak dan Keluarga (*Kodomo Kateichō*) sebagai lembaga baru yang berfungsi mengintegrasikan kebijakan, menjamin perlindungan anak, dan mempermudah pengasuhan anak dengan bantuan dukungan pemerintah secara komprehensif. Jika ditinjau dari berbagai pemberitaan media, efektivitas lembaga ini masih dipertanyakan, terutama terkait kemampuan mengatasi hambatan birokrasi dan memastikan kebijakan benar-benar menyentuh kebutuhan anak dan keluarga di lapisan masyarakat luas. Dilansir dari laman berita International Education News, Hirokazu Yokota, seorang birokrat Jepang dengan pengalaman lintas kementerian dan salah satu pendiri *Digital Agency* Jepang, berbagi pengalamannya ketika bekerja di *Children and Families Agency* (CFA) dan menyatakan bahwa badan ini berupaya menempatkan anak beserta kebijakan terkait di pusat kehidupan masyarakat melalui konsep (*Kodomo Mannaka Shakai*) atau masyarakat berpusat pada anak, dengan menjamin hak-hak mereka, memastikan tidak ada anak yang tertinggal, serta mendorong pertumbuhan anak yang sehat dengan dukungan kolektif dari seluruh elemen masyarakat (Hatch, 2025).

Pembentukan Badan Anak dan Keluarga (*Kodomo Kateichō*) dilatarbelakangi oleh kebutuhan mendesak untuk menghadapi penurunan angka kelahiran (*Shōshika*) yang signifikan. Menurut World Bank (2023) Jepang telah

mengalami penurunan angka kelahiran yang cepat dan signifikan. Angka kelahiran total (*total fertility rate*) merupakan jumlah anak yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan jika ia hidup hingga akhir masa suburnya dan melahirkan anak sesuai dengan angka kelahiran spesifik usia saat ini (Bank, 2023). Pada tahun 2022, angka kelahiran total di Jepang adalah 1,26 dan jumlah kelahiran turun di bawah 800.000, mencapai rekor terendah. Angka ini jauh dari angka pengganti populasi ideal sebesar 2,1 dan menjadi indikator kuat bahwa Jepang sedang mengalami krisis demografis yang serius. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tren tersebut, berikut adalah grafik (Lihat Gambar 1) perkembangan angka fertilitas total Jepang dari tahun 1960 hingga 2022.



Gambar 1.1 Tren *Total Fertility Rate* (TFR) Jepang, 1960-2022.

Sumber: Data diadaptasi dari World Bank (2023) (Bank, 2023).

Krisis demografis serius tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari fenomena jangka panjang yang telah berlangsung sejak dekade 1990 an. Menurut (Liu et al., 2024) Jepang mengalami penuaan populasi secara drastis, dengan proporsi penduduk lanjut usia (65 tahun ke atas) mencapai lebih dari 29% pada tahun 2020 (Liu et al., 2024). Akibatnya generasi muda harus menanggung beban ekonomi yang lebih besar, sekaligus mempertahankan keberlanjutan sistem jaminan sosial yang mulai terancam stabilitasnya karena ketidakseimbangan antara populasi usia produktif dan lansia.

Ditambah lagi dengan pandemi COVID-19 yang mempercepat tekanan terhadap sistem keluarga di Jepang. Penelitian yang dilakukan oleh (Shimizu et al., 2023) menunjukkan data peningkatan angka pengangguran sementara, perubahan pola kerja menjadi *remote working*, dan bertambahnya beban pengasuhan yang harus ditanggung oleh keluarga, terutama oleh ibu rumah tangga. Situasi ini memperburuk persepsi banyak pasangan muda terhadap prospek berkeluarga dan membesarkan anak, sehingga menambah lapisan kompleks dalam dinamika demografis Jepang (Shimizu et al., 2023).

Berdasarkan pemaparan sebelumnya kebijakan Badan Anak dan Keluarga (*Kodomo Kateichō*) menjadi upaya pemerintah Jepang dalam mengatasi masalah demografis yaitu (*Shōshika*). Dalam kondisi demikian, media memiliki peran krusial dalam menyampaikan serta membingkai narasi mengenai kebijakan publik. Adapun menurut Burhan Bungin, media massa adalah media komunikasi dan informasi yang melakukan penyebaran informasi secara massal dan dapat diakses oleh masyarakat secara massal pula (Bungin, 2017). Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Apriliyanti et al., 2022) yang menyatakan bahwa media tidak hanya berfungsi sebagai penyalur informasi, tetapi juga sebagai aktor yang mempengaruhi opini publik melalui pilihan diksi, struktur narasi, serta fokus visual yang diangkat dalam pemberitaannya (Apriliyanti et al., 2022). Oleh karena itu, bagaimana media membingkai kebijakan pembentukan Badan Anak dan Keluarga (*Kodomo Kateichō*) layak untuk diteliti secara mendalam.

Di Jepang terdapat media-media yang membedakan cara mereka menyoroti isu sosial, termasuk pembentukan Badan Anak dan Keluarga (*Kodomo Kateichō*). Salah satu media utama adalah Asahi Shimbun, yang dalam kajian media sering dikategorikan memiliki orientasi progresif liberal. Menurut (Krauss, 2000) orientasi progresif liberal dalam konteks jurnalisme Jepang merujuk pada kecenderungan

media untuk menekankan nilai-nilai hak asasi manusia, keadilan sosial, kesetaraan gender, serta sikap kritis terhadap kebijakan negara, khususnya ketika kebijakan tersebut dinilai berpotensi mengabaikan kelompok rentan atau menimbulkan ketimpangan struktural (Krauss, 2000). Asahi Shimbun secara historis dikenal sebagai media yang relatif independen dari pemerintah dan sering mengedepankan kritik terhadap kebijakan publik melalui perspektif kesejahteraan sosial dan demokrasi liberal (Pharr & Krauss, 1996). Dalam pemberitaannya mengenai pembentukan Badan Anak dan Keluarga (*Kodomo Kateichō*), Asahi Shimbun kerap menyoroti aspek struktural, yaitu faktor-faktor sistemik yang melekat pada struktur sosial dan kebijakan publik, termasuk desain kebijakan negara, sistem ketenagakerjaan yang tidak mendukung keberlanjutan karier ibu, serta norma gender yang menempatkan perempuan sebagai pengasuh utama. Dengan bingkai ini, persoalan anak dan keluarga diposisikan sebagai hasil dari ketimpangan struktural, bukan semata-mata akibat pilihan individu.

Sebaliknya, Yomiuri Shimbun umumnya dipahami sebagai media yang berorientasi konservatif. Menurut (Tunstall, 1977) orientasi konservatif dalam jurnalisme Jepang merujuk pada kecenderungan media untuk menekankan stabilitas sosial, legitimasi kebijakan pemerintah, nilai-nilai keluarga tradisional, serta pentingnya tanggung jawab individu dan kohesi sosial dalam menghadapi persoalan masyarakat (Tunstall, 1977; dalam Freeman, 2000). Yomiuri Shimbun memiliki hubungan yang relatif dekat dengan institusi negara dan sering merepresentasikan sudut pandang arus utama (*mainstream*) yang mendukung kebijakan pemerintah, terutama dalam isu-isu yang berkaitan dengan keamanan, administrasi publik, dan tatanan sosial (Pharr & Krauss, 1996). Dalam konteks pemberitaan pembentukan Badan Anak dan Keluarga (*Kodomo Kateichō*), Yomiuri Shimbun cenderung membingkai kebijakan tersebut secara afirmatif dengan

menekankan aspek administratif, keterbatasan anggaran negara, serta pentingnya koordinasi birokrasi dan peran keluarga sebagai fondasi utama kesejahteraan anak.

Selain kedua media tersebut, terdapat pula media yang mengadopsi pendekatan relatif netral dengan menyampaikan informasi secara deskriptif tanpa penilaian normatif yang eksplisit. Perbedaan cara pandang ini menunjukkan bahwa media massa tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai aktor ideologis yang secara aktif mengonstruksi realitas sosial sesuai dengan orientasi nilai dan posisi editorial masing-masing.

Konsep *framing* sebagaimana dikembangkan oleh Robert N. Entman menawarkan kerangka teoritis yang relevan untuk memahami bagaimana media mengkonstruksi makna kebijakan. Menurut (Entman, 1993), *framing* melibatkan empat elemen utama: *problem definition*, *causal interpretation*, *moral evaluation*, dan *treatment recommendation*. Keempat elemen ini menjadi fondasi untuk memahami bagaimana suatu isu disajikan dan diterima oleh masyarakat (Entman, 1993). Maka dari itu, *framing* media terhadap pembentukan (*Kodomo Kateichō*) menjadi alat yang penting untuk mengkaji apakah kebijakan tersebut dipandang sebagai solusi konkret, simbolisme politik semata, atau justru mendapat kritik karena tidak menyentuh akar persoalan. Variasi pemberitaan media mencerminkan beragam posisi ideologis dan kepentingan institusional masing-masing media.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Toivonen, 2011) menyatakan bahwa *framing* media Jepang terhadap isu sosial sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya yang konservatif, etika nasionalisme, serta kedekatan media dengan lembaga negara (Toivonen, 2011). Hal ini menyebabkan isu-isu struktural yang kerap diredam dan digantikan oleh narasi yang menekankan moralitas individu atau keluarga sebagai solusi utama. Menurut (Hososaka et al., 2024) dalam isu kesejahteraan anak, media Jepang cenderung membingkai topik seputar peran ibu

sebagai pengasuh utama dan menekankan pentingnya keluarga tradisional sebagai benteng sosial (Hososaka et al., 2024). *Framing* semacam ini memperkuat struktur patriarkal dan menghambat reformasi kebijakan yang seharusnya berbasis keadilan sosial dan kesetaraan gender. Selain itu, (Johnson, 2022) menyatakan bahwa *framing* yang mengabaikan dimensi struktural juga dapat mengalihkan perhatian publik dari permasalahan kebijakan yang lebih luas, seperti kurangnya dukungan institusional, minimnya subsidi pengasuhan anak, serta ketimpangan gender, dengan fokus pada narasi individualistik alih-alih solusi kebijakan jangka panjang. (Johnson, 2022). Dalam konteks inilah *framing* terhadap *Kodomo Kateichō* menjadi alat yang menentukan persepsi publik dan potensi keberhasilan implementasi kebijakan lembaga tersebut.

Urgensi penelitian ini terletak pada peran media massa dalam membentuk persepsi publik terhadap kebijakan sosial yang berdampak langsung pada masa depan demografi dan kesejahteraan masyarakat Jepang. Pembentukan Badan Anak dan Keluarga (*Kodomo Kateichō*) merupakan kebijakan yang relatif baru dan masih berada pada tahap awal implementasi, sehingga *framing* media pada periode ini berpotensi menentukan cara kebijakan tersebut dipahami dan dievaluasi oleh publik. Oleh karena itu, analisis *framing* pemberitaan Asahi Shimbun dan Yomiuri Shimbun menjadi penting untuk mengungkap bagaimana perbedaan orientasi ideologis media mengonstruksi makna kebijakan publik, sekaligus mengisi keterbatasan kajian yang masih jarang menelaah pembedaan media terhadap pembentukan lembaga pemerintah baru di Jepang, khususnya dalam isu anak dan keluarga.

Dalam penelitian ini, penulis mengkaji konten berita mengenai pembentukan Badan Anak dan Keluarga (*Kodomo Kateichō*) di Jepang yang diambil dari artikel-artikel pemberitaan Asahi Shimbun dan Yomiuri Shimbun

melalui analisis *Framing*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana *framing* media massa Asahi Shimbun dan Yomiuri Shimbun dalam mengkonstruksi berita pembentukan Badan Anak dan Keluarga (*Kodomo Kateichō*) di Jepang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana *framing* yang digunakan oleh media massa Asahi Shimbun dan Yomiuri Shimbun dalam mengkonstruksi berita mengenai pembentukan Badan Anak dan Keluarga (*Kodomo Kateichō*) di Jepang.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah pemberitaan mengenai pembentukan Badan Anak dan Keluarga (*Kodomo Kateichō*) di Jepang yang bersumber dari portal berita Asahi Shimbun dan Yomiuri Shimbun. Artikel-artikel berita yang dianalisis berlaku sejak lembaga tersebut yang mulai diresmikan pada April 2023 hingga penelitian ini dilakukan yakni sampai Agustus 2025. Periode ini dipilih karena kebijakan tersebut baru diberlakukan sejak April 2023.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan analisis *framing* Robert N. Entman. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada upaya memahami proses konstruksi makna yang dilakukan media massa dalam pemberitaan, khususnya dalam membingkai pembentukan Badan Anak dan Keluarga (*Kodomo Kateichō*) di Jepang. Pendekatan analisis *framing* Robert N. Entman

memungkinkan penulis untuk menelaah makna, penekanan, serta sudut pandang yang dibangun media, bukan sekadar menghitung frekuensi kemunculan isu.

Tahap awal penelitian dimulai dengan proses pengumpulan data berita daring dari dua media nasional Jepang, yaitu Asahi Shimbun dan Yomiuri Shimbun. Pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri artikel berita yang memuat kata kunci terkait pembentukan Badan Anak dan Keluarga (*Kodomo Kateichō*), seperti *kodomo kateichō*, kebijakan anak, kesejahteraan keluarga, serta isu-isu turunan yang berkaitan. Proses penelusuran ini dilakukan sejak lembaga tersebut resmi dibentuk pada April 2023 hingga periode penelitian berlangsung. Pada tahap ini, penulis memperoleh sebanyak 1.109 artikel berita dari Asahi Shimbun dan 659 artikel berita dari Yomiuri Shimbun.

Namun demikian, tidak seluruh artikel berita yang ditemukan dapat digunakan sebagai data penelitian. Salah satu kendala yang dihadapi penulis adalah keterbatasan akses terhadap berita berbayar. Sebagian artikel pada kedua media hanya dapat diakses melalui sistem langganan, sehingga tidak memungkinkan untuk dianalisis secara menyeluruh. Oleh karena itu, penulis membatasi data pada artikel yang dapat diakses secara terbuka (*open access*) agar proses analisis dapat dilakukan secara transparan dan dapat direplikasi oleh peneliti lain. Tahap ini sekaligus menjadi bentuk upaya penulis untuk meminimalkan subjektivitas dalam pemilihan data.

Setelah tahap seleksi berdasarkan aksesibilitas, penulis melakukan proses kategorisasi data berdasarkan kesamaan tema. Artikel-artikel yang lolos seleksi awal kemudian dikelompokkan ke dalam beberapa kategori yang berkaitan langsung dengan isu pembentukan Badan Anak dan Keluarga (*Kodomo Kateichō*), seperti isu mengenai anggaran pemerintah, tunjangan pegawai, subsidi pemerintah, fasilitas terkait anak dan keluarga, kebijakan pemerintah, kekerasan terhadap anak,

kasus kematian dan bunuh diri anak, pengasuhan anak, persalinan ibu hamil, layanan penitipan anak, kafetaria anak (*Kodomo Shokudō*), penurunan angka kelahiran (*Shōshika*), survei dan laporan lembaga, serta isu-isu lain mengenai keberadaan lembaga tersebut. Melalui proses kategorisasi ini, jumlah data menyusut menjadi 59 artikel berita dari Asahi Shimbun dan 112 artikel berita dari Yomiuri Shimbun yang dinilai relevan dengan fokus penelitian.

Tahap selanjutnya adalah pemilihan sampel penelitian melalui proses eliminasi bertahap. Pada tahap ini, penulis tidak memilih artikel secara acak, melainkan berdasarkan sejumlah kriteria yang jelas. Pertama, aspek komprehensivitas, yaitu artikel yang memuat pembahasan isu secara mendalam, tidak hanya bersifat informatif singkat, serta mengandung konteks kebijakan yang lebih luas. Kedua, aspek representativitas, yaitu artikel yang mampu mewakili kecenderungan pemberitaan media terhadap tema tertentu dan mencerminkan pola *framing* yang konsisten. Ketiga, aspek keterkaitan langsung dengan Badan Anak dan Keluarga (*Kodomo Kateichō*), baik secara eksplisit melalui penyebutan lembaga maupun secara implisit melalui pembahasan kebijakan dan isu yang berada dalam lingkup kewenangannya.

Berdasarkan kriteria tersebut, penulis kemudian memilih masing-masing tujuh artikel dari Asahi Shimbun dan Yomiuri Shimbun sebagai sampel akhir penelitian. Ketujuh sampel dari masing-masing media dipilih untuk mewakili variasi isu utama yang berkaitan dengan pembentukan Badan Anak dan Keluarga (*Kodomo Kateichō*), sehingga hasil analisis tidak bertumpu pada satu jenis isu saja. Pemilihan jumlah sampel yang terbatas ini dilakukan untuk memungkinkan analisis yang lebih mendalam dan terfokus, sesuai dengan karakter penelitian kualitatif.

Seluruh sampel berita yang telah terpilih kemudian dianalisis menggunakan model *framing* Robert N. Entman, yang meliputi empat elemen utama, yaitu

pendefinisian masalah (*define problems*), diagnosis penyebab (*diagnose causes*), penilaian moral (*make moral judgement*), dan rekomendasi penyelesaian (*treatment recommendation*). Melalui empat elemen ini, penulis mengkaji bagaimana masing-masing media membingkai isu pembentukan Badan Anak dan Keluarga (*Kodomo Kateichō*) serta makna yang dikonstruksikan dalam pemberitaan.

Pertimbangan pemilihan kedua portal berita Asahi Shimbun dan Yomiuri Shimbun adalah pemberitaan dari kedua media ini sangat berpengaruh dalam membentuk opini masyarakat Jepang karena jangkauan pembaca mereka yang luas dan peran mereka dalam membentuk agenda setting politik nasional (Diao & Yu, 2025). Perbedaan orientasi editorial kedua media tersebut juga menjadi pertimbangan utama, karena memungkinkan penulis untuk membandingkan variasi *framing* terhadap kebijakan publik yang sama secara lebih jelas dan sistematis.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoretis

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan studi media massa, khususnya dalam menganalisis pemberitaan media terhadap kebijakan sosial di Jepang yang berfokus pada pembentukan Badan Anak dan Keluarga (*Kodomo Kateichō*). Melalui pendekatan analisis *framing* Robert N. Entman, penelitian ini memberikan pemahaman teoretis mengenai bagaimana media merespons, mengonstruksi, dan membingkai isu kebijakan dalam konteks sosial budaya Jepang kontemporer. Selain itu, penelitian ini memperlihatkan secara empiris perbedaan orientasi ideologis antara media progresif seperti Asahi Shimbun dan media konservatif seperti Yomiuri Shimbun, sehingga memperkaya diskursus mengenai hubungan antara *framing* media dan pembentukan persepsi publik terhadap kebijakan publik.

1.6.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis sebagai bahan referensi akademik bagi peneliti, mahasiswa, maupun pembaca umum yang memiliki ketertarikan terhadap kajian media massa, kebijakan sosial, dan isu anak serta keluarga di Jepang. Hasil penelitian ini juga dapat dimanfaatkan sebagai rujukan awal bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji analisis *framing* media, khususnya dalam konteks kebijakan publik dan pembentukan lembaga pemerintah di Jepang. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Jepang Universitas Diponegoro sebagai bahan pendukung pengembangan kajian kebudayaan Jepang kontemporer, terutama yang berkaitan dengan relasi antara media, ideologi, dan kebijakan sosial. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi dasar pengembangan studi lanjutan dengan objek, periode, maupun pendekatan teoretis yang berbeda namun masih berada dalam lingkup kajian serupa.

1.7 Sistematika Penelitian

Untuk memudahkan proses pengerjaan penelitian sekaligus pembacaan laporan hasil penelitian, maka diperlukan rumusan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab 1 pendahuluan, bab ini menjelaskan mengenai konteks awal penelitian yang terdiri dari beberapa subbagian, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, metode penelitian, manfaat penelitian (teoritis dan praktis), serta sistematika penelitian. Seluruh subbab dalam bab ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum mengenai arah, fokus, dan tujuan penelitian.

Bab 2 kajian pustaka, bab ini memuat uraian mengenai landasan teoretis dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Subbabnya terdiri dari penelitian

terdahulu, kerangka teori yang meliputi teori *framing* Robert N. Entman dan konsep konstruksi sosial media massa, serta pembahasan mengenai Badan Anak dan Keluarga di Jepang. Bab ini memberikan kerangka analitis yang akan digunakan penulis dalam memahami dan menafsirkan permasalahan penelitian.

Bab 3 pembahasan, pada bab ini berisi analisis mendalam terhadap objek penelitian, yakni pemberitaan mengenai pembentukan Badan Anak dan Keluarga (*Kodomo Kateichō*) di Jepang dalam media Asahi Shimbun dan Yomiuri Shimbun. Analisis dilakukan dengan pendekatan *framing* Robert N. Entman. Subbab pada bab ini terdiri dari analisis pemberitaan dari Asahi Shimbun dan analisis pemberitaan dari Yomiuri Shimbun. Pembahasan disusun secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah dan menunjukkan perbedaan konstruksi bingkai yang digunakan oleh masing-masing media.

Bab 4 penutup, bab terakhir berisi kesimpulan dan hasil pembahasan yang merangkum temuan utama penelitian. Bab ini juga memuat saran-saran yang relevan untuk pengembangan studi selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Diskusi akademis mengenai pembentukan Badan Anak dan Keluarga di Jepang mulai mendapatkan perhatian yang lebih luas pada beberapa tahun terakhir, terutama sejak wacana pembentukan Badan Anak dan Keluarga (*Kodomo Kateichō*) resmi dicanangkan oleh pemerintah Jepang dan mulai berlaku pada April 2023. Kebijakan ini muncul sebagai respons pemerintah terhadap berbagai permasalahan sosial yang kompleks, seperti penurunan angka kelahiran (*Shōshika*), meningkatnya beban pengasuhan pada keluarga, serta kebutuhan akan koordinasi lintas kementerian dalam menangani isu-isu kesejahteraan anak (Press, 2023).

Dalam konteks akademis, kajian mengenai kebijakan ini penting untuk memahami bagaimana negara mengatur dan memprioritaskan isu perlindungan anak serta dukungan terhadap keluarga dalam kerangka kebijakan sosialnya. Seiring dengan berkembangnya kebijakan tersebut, penelitian yang mengaitkan peran media dalam membingkai dan mengonstruksi persepsi publik terkait kebijakan ini menjadi semakin relevan, mengingat media memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan opini dan legitimasi kebijakan di mata masyarakat. Oleh karena itu, penulis memilih beberapa penelitian terdahulu yang relevan untuk dijadikan tinjauan pustaka atas penelitian-penelitian sebelumnya sebagai berikut.

Penelitian yang pertama adalah artikel jurnal karya Muhammad Umar yang diterbitkan tahun 2024 dengan judul artikel *Child Centered Society: “Children” Social Construction on Children and Families Agency’s (Japan) Websites*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis wacana

untuk mengkaji bagaimana konstruksi sosial tentang anak dibangun melalui laman resmi *Children and Families Agency* di Jepang. Secara teoretis, penelitian ini berangkat dari perspektif konstruksi sosial yang menempatkan bahasa, visual, dan narasi sebagai sarana utama dalam membentuk makna kebijakan publik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa laman resmi *Children and Families Agency* merepresentasikan anak sebagai subjek utama kebijakan publik yang memiliki hak atas perlindungan, partisipasi, dan pengembangan diri. Negara, keluarga, dan masyarakat digambarkan sebagai aktor yang saling berkolaborasi dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan anak. Melalui pemilihan diksi dan visual tertentu, pemerintah membangun citra kebijakan yang berorientasi pada prinsip *child centered society*.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek kajian yang sama, yaitu Badan Anak dan Keluarga (*Kodomo Kateichō*) di Jepang, serta fokus pada konstruksi makna kebijakan anak dan keluarga. Adapun perbedaannya, penelitian Muhammad Umar menganalisis wacana yang dibangun oleh lembaga pemerintah melalui media resminya, sedangkan penelitian ini mengkaji pemingkakan isu yang dilakukan oleh media massa independen melalui analisis *framing* Robert N. Entman. Dengan demikian, penelitian ini melengkapi kajian sebelumnya dengan menyoroti bagaimana kebijakan yang sama dikonstruksi secara berbeda di ruang publik melalui perspektif media massa.

Penelitian yang kedua adalah artikel jurnal karya Hanae Ono, Ko Hayakawa, dan Takeo Kondo yang diterbitkan tahun 2025 dengan judul artikel “*From Grassroots to Policy: Kodomo Shokudo*”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis perkembangan *Kodomo Shokudo* atau kantin anak di Jepang, yang bertransformasi dari inisiatif komunitas

akar rumput menjadi bagian dari kebijakan sosial yang diakui oleh pemerintah. Kajian ini berangkat dari perspektif kebijakan sosial dan partisipasi komunitas, dengan menekankan peran berbagai pemangku kepentingan, seperti relawan, organisasi nirlaba, dan pemerintah daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Kodomo Shokudo* tidak hanya berfungsi sebagai penyedia makanan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, tetapi juga sebagai ruang sosial yang mendukung hubungan antar anggota komunitas, perkembangan emosional anak, serta penguatan solidaritas sosial. Namun, penelitian ini juga mengungkap sejumlah tantangan dalam implementasinya, antara lain keterbatasan pendanaan, ketergantungan pada tenaga relawan, serta ketimpangan dukungan pemerintah antar wilayah. Temuan ini menunjukkan adanya jarak antara semangat gerakan komunitas dan mekanisme birokrasi dalam kebijakan sosial.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap isu anak dan keluarga di Jepang serta pembahasan mengenai kebijakan sosial yang berkaitan dengan kesejahteraan anak. Adapun perbedaannya, penelitian Ono, Hayakawa, dan Kondo menitikberatkan pada proses transformasi gerakan sosial menjadi kebijakan publik, tanpa mengkaji peran media massa dalam membingkai isu tersebut. Sementara itu, penelitian ini secara khusus menganalisis *framing* media massa terhadap kebijakan anak dan keluarga melalui pemberitaan daring, sehingga memberikan perspektif berbeda mengenai konstruksi wacana kebijakan di ruang publik.

Penelitian yang ketiga adalah artikel jurnal karya Rikuya Hosokawa, Riho Tomozawa, dan Toshiki Katsura yang diterbitkan tahun 2023 dengan judul artikel *“Associations between Family Routines, Family Relationship, and Children’s Behavior”*. Artikel Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan

metode survei terhadap 717 orang tua siswa sekolah dasar di Jepang, yang dianalisis menggunakan teknik *path analysis*. Secara teoretis, penelitian ini berangkat dari perspektif psikologi keluarga yang menempatkan rutinitas dan kualitas hubungan keluarga sebagai faktor penting dalam perkembangan perilaku anak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rutinitas keluarga yang konsisten memiliki hubungan positif dengan kohesi dan ekspresivitas keluarga, serta berkontribusi pada penurunan perilaku bermasalah dan peningkatan perilaku prososial anak. Sebaliknya, konflik dalam keluarga berkorelasi dengan meningkatnya perilaku negatif dan menurunnya kecenderungan prososial. Temuan ini menegaskan pentingnya stabilitas rutinitas dan hubungan keluarga yang harmonis sebagai faktor protektif dalam perkembangan psikososial anak di Jepang.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap isu anak dan keluarga di Jepang, khususnya dalam konteks kesejahteraan dan perkembangan anak. Adapun perbedaannya, penelitian Hosokawa, Tomozawa, dan Katsura menitikberatkan pada analisis hubungan internal dalam keluarga menggunakan pendekatan kuantitatif, tanpa mengkaji peran media massa dalam membingkai isu anak dan keluarga. Sementara itu, penelitian ini menganalisis konstruksi wacana kebijakan anak dan keluarga di ruang publik melalui *framing* media massa, sehingga memberikan sudut pandang yang berbeda terhadap isu kesejahteraan anak di Jepang.

Penelitian yang keempat adalah skripsi yang disusun oleh Meilina Anung Pratiwi dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni, Universitas PGRI Semarang yang diterbitkan pada tahun 2022, dengan judul *Analisis Framing Pemberitaan Kasus Kepolisian Indonesia oleh Media Massa Online Tahun 2021: Pendekatan Robert Entman*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis *framing*

Robert N. Entman, yang menitikberatkan pada empat perangkat analisis *framing*, yaitu *define problems*, *diagnose causes*, *make moral judgement*, dan *treatment recommendation*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa media massa daring di Indonesia membingkai kasus yang melibatkan oknum Kepolisian Indonesia secara berbeda-beda sesuai dengan kebijakan redaksi dan latar belakang masing-masing media. Republika.co.id dan Detik.com cenderung menampilkan citra positif kepolisian dengan menekankan profesionalisme institusi, sementara Kompas.com dan Tribunnews.com menyajikan pemberitaan yang lebih faktual dan langsung tanpa menunjukkan keberpihakan tertentu. Perbedaan *framing* tersebut memperlihatkan bahwa satu peristiwa yang sama dapat dikonstruksi secara berbeda oleh media, sehingga memengaruhi persepsi publik.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada penggunaan teori dan model analisis *framing* Robert N. Entman sebagai kerangka analisis utama dalam mengkaji pemberitaan media massa. Adapun perbedaannya, penelitian Meilina Anung Pratiwi berfokus pada pemberitaan kasus kepolisian di Indonesia oleh media daring, sedangkan penelitian ini mengkaji pemingkai media massa Jepang terhadap kebijakan publik, khususnya pembentukan Badan Anak dan Keluarga (*Kodomo Kateichō*). Dengan demikian, penelitian ini memperluas penerapan analisis *framing* Entman dalam konteks kebijakan sosial dan media di Jepang.

Penelitian yang kelima adalah skripsi yang disusun oleh Owen Sakkaa Rossy dari Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Jepang, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro Semarang yang diterbitkan pada tahun 2024, dengan judul Kebijakan Reformasi Gaya Kerja di Jepang: Analisis *Framing* Pemberitaan Daring. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis *framing* Robert

N. Entman untuk mengkaji bagaimana media daring Jepang, yaitu NHK News (*Nippon Hoso Kyokai News*), NNN (*Nippon News Network*), dan Nikkei Shimbun (*Nihon Keizai Shimbun*) dalam membingkai pemberitaan mengenai kebijakan Reformasi Gaya Kerja (*Hatarakikata Kaikaku*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga media tersebut sama-sama membingkai reformasi gaya kerja sebagai kebijakan strategis untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan menjaga keberlanjutan ekonomi nasional, namun dengan penekanan *framing* yang berbeda. NHK News menyoroti urgensi reformasi dalam mengatasi jam kerja panjang dan *power harassment*, NNN menekankan fleksibilitas kerja serta solusi praktis yang ditawarkan oleh perusahaan, sedangkan Nikkei Shimbun lebih fokus pada implementasi prinsip “pekerjaan yang sama, gaji yang sama” dan kritik terhadap sistem senioritas tradisional. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa konstruksi realitas kebijakan dipengaruhi oleh sudut pandang redaksional masing-masing media.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada penggunaan teori dan model analisis *framing* Robert N. Entman untuk mengkaji pemberitaan media daring Jepang mengenai kebijakan publik. Adapun perbedaannya, penelitian Owen Sakkaa Rossy berfokus pada kebijakan reformasi gaya kerja, sementara penelitian ini mengkaji pembingkai media terhadap kebijakan anak dan keluarga, khususnya pembentukan Badan Anak dan Keluarga (*Kodomo Kateichō*). Dengan demikian, penelitian ini memperluas kajian *framing* media di Jepang dengan objek kebijakan sosial yang berbeda, tetapi masih berada dalam kerangka analisis yang sama.

Berdasarkan telaah terhadap penelitian-penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa kajian mengenai isu anak dan keluarga di Jepang telah dilakukan melalui beragam pendekatan, mulai dari analisis wacana lembaga

pemerintah, studi kebijakan sosial berbasis komunitas, hingga penelitian kuantitatif mengenai dinamika keluarga serta analisis *framing* media terhadap kebijakan publik. Namun, penelitian yang secara spesifik mengkaji pembingkai media massa Jepang terhadap pembentukan lembaga pemerintah baru, khususnya Badan Anak dan Keluarga (*Kodomo Kateichō*), masih terbatas. Selain itu, perbedaan orientasi ideologis media dalam mengonstruksi kebijakan sosial belum banyak dianalisis secara komparatif. Oleh karena itu, penelitian ini memanfaatkan teori *framing* Robert N. Entman sebagai kerangka teoretis utama untuk mengkaji bagaimana media massa membingkai kebijakan pembentukan Badan Anak dan Keluarga *Kodomo Kateichō*, sehingga dapat mengisi kekosongan kajian sekaligus memberikan pemahaman yang lebih sistematis mengenai peran media dalam mengonstruksi makna kebijakan publik di Jepang.

2.2. Kerangka Teori

2.2.1. Teori *Framing* Robert N. Entman

Teori *framing* merupakan salah satu teori dalam studi komunikasi yang berfungsi untuk memahami bagaimana media membingkai realitas melalui proses seleksi, penonjolan, dan pengemasan isu. Robert N. Entman (1993) mendefinisikan *framing* sebagai proses menyeleksi aspek tertentu dari realitas yang dipersepsikan dan membuatnya lebih menonjol dalam teks komunikasi, sehingga pesan tersebut memiliki bobot interpretatif yang lebih kuat dibandingkan aspek lainnya. Pada hakikatnya *framing* adalah strategi media untuk mengorganisasi realitas, bukan hanya merepresentasikan fakta, tetapi juga menekankan sudut pandang tertentu yang sejalan dengan kepentingan atau ideologi media (Entman, 1993).

Teori *framing* bertujuan untuk mengidentifikasi skema di mana individu memandang atau memahami dunia. Akar teori *framing* sering dikaitkan dengan sosiolog Erving Goffman yang berpendapat bahwa desain interpretatif merupakan elemen sentral dari sistem kepercayaan budaya. Goffman menyebut desain interpretatif ini sebagai bingkai (*frame*) yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk memahami dunia. Bingkai membantu mengurangi kompleksitas informasi, tetapi berfungsi sebagai proses dua arah: Bingkai membantu menafsirkan dan merekonstruksi realitas pada saat yang sama (Volkmer dalam Littlejohn, 2009). Maka dari itu selain desain interpretatif Goffman, teori *framing* juga cukup banyak menerima sumbangsih dari teori konstruksi sosial atas realitas. Konstruksi realitas yang sebelumnya berlangsung lambat kemudian juga dikritisi oleh Bungin dengan mengaplikasikan kelebihan media, hal ini juga sejalan dengan penggunaan teori *framing* sebagai teori komunikasi.

Berita layaknya buku, juga merupakan jendela bagi individu untuk melihat

dunia terutama yang berada di luar jangkauannya. Dengan cakupan berita yang begitu luas saat ini, seseorang yang berada di bagian bumi utara dapat dengan mudah mengetahui apa yang sedang terjadi di belahan bumi selatan. Namun sebaliknya, layaknya bingkai jendela, terdapat batasan pandang yang menghalangi kita untuk melihat sesuatu di luar *frame* tersebut. Begitu pun apa yang kita lihat juga sangat dipengaruhi oleh *frame* atau bingkai yang ada, seperti dimanakah posisi bingkai dalam menginformasikan suatu isu tersebut (Eriyanto, 2002).

Teori maupun metode penelitian *framing* sendiri pada dasarnya berada dalam paradigma konstruksionis yang menekankan konstruksi peristiwa dan realitas. Berbanding terbalik dengan positivis yang meyakini bahwa ada sebuah kebenaran absolut, konstruksionis meyakini bahwa fakta merupakan konstruksi atas realitas dan kebenarannya bersifat relatif. Dari pandangan tersebut pun, dilansir dari Eriyanto (2002) media bukanlah sekadar saluran penyampaian pesan, melainkan juga merupakan agen yang menkonstruksi realitas, sehingga pada hasilnya suatu peristiwa dapat ditafsirkan dan disajikan dalam berbagai dimensi dan sudut pandang. Diversifikasi dan perbedaan ini terjadi karena dalam proses konstruksi tersebut ada banyak penafsiran dan pemaknaan yang berbeda-beda dalam memahami suatu peristiwa yang terjadi.

Dilansir dari Eriyanto (2002) dan Entman (1993) mendefinisikan *framing* sebagai upaya seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek tertentu dari sebuah realitas. Pemilihan *frame* dalam pemberitaan suatu isu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti keberpihakan media, kultur media, kebijakan pemerintah, pemilik modal, dan lain sebagainya. Institusi media merupakan institusi aktif dengan aktor-aktor berkepentingan, di mana keberpihakan wartawan turut memengaruhi cara berita dibingkai dan disajikan kepada masyarakat.

Framing juga merupakan metode analisis teks yang memandang realitas sebagai bukan sesuatu yang natural, namun merupakan hasil konstruksi. Hal ini juga yang menyebabkan *framing* menjadi teori yang penting dalam riset jurnalisme dan komunikasi politik. *Framing* dianggap sangat membantu dalam mengkaji ketidakseimbangan serta kekuatan yang tersembunyi dibalik penyajian pemberitaan.

Teori *framing* dalam penelitian ini berperan penting untuk menelaah bagaimana media Jepang membingkai isu pembentukan Badan Anak dan Keluarga. Setiap bingkai yang digunakan media berpotensi memengaruhi cara masyarakat memahami isu tersebut serta membentuk kesan yang berbeda terhadap topik pemberitaan. Secara khusus peneliti akan menggunakan model analisis *framing* oleh Robert N. Entman untuk membedah pemberitaan yang akan diteliti. Dapat dilihat pada tabel 1 bahwa model analisis *framing* Entman terbagi menjadi empat elemen utama sebagai berikut:

<i>Define Problems</i> (Penjelasan masalah)	Bagaimana suatu peristiwa/isu dilihat? Sebagai apa? Atau sebagai masalah apa?
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan penyebab)	Peristiwa itu dilihat disebabkan oleh apa? Apa yang dianggap sebagai penyebab dari suatu masalah? Siapa yang dianggap sebagai penyebab masalah?

<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat keputusan moral)	Nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan peristiwa yang ada? Nilai moral apa yang dipakai untuk melegitimasi atau mendelegitimasi suatu tindakan?
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)	Penyelesaian apa yang ditawarkan untuk mengatasi masalah/isu? Jalan apa yang ditawarkan dan harus ditempuh menyelesaikan masalah?

Tabel 2.1 Model Analisis *Framing* Robert N. Entman

(Sumber: Robert N. Entman dalam Eriyanto, "Analisis *Framing*: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media", 2002: 223-224.)

2.2.2. Konsep Konstruksi Sosial Media Massa

Konstruksi sosial media massa apabila dijelaskan secara sederhana merupakan kritik sekaligus teori lanjutan dari pemikiran Peter L. Berger & Thomas Luckmann yaitu teori konstruksi sosial atas realitas. Konstruksi sosial atas realitas sebagai bagian dari teori sosiologi mempertanyakan relativitas sosial atas "kenyataan" dan "pengetahuan". Sebagai contoh Berger dan Luckmann menggambarkan bagaimana apa yang "nyata" bagi seorang biarawan Tibet mungkin saja tidak "nyata" bagi seorang pengusaha Amerika, begitu pun "Pengetahuan" seorang penjahat akan berbeda dengan "pengetahuan seorang ahli kriminologi (Berger & Luckmann, 2018). Hal ini yang kemudian memunculkan kebutuhan akan sosiologi pengetahuan, yang dibutuhkan untuk mengamati dan

memahami perbedaan-perbedaan “pengetahuan” di antara masyarakat, dan proses-proses bagaimana setiap perangkat pengetahuan, pada akhirnya dapat ditetapkan secara sosial sebagai kenyataan atau realitas.

Berger dan Luckmann (1990) dalam Bungin (Bungin, 2011) mengatakan bahwa institusi masyarakat tercipta dan dipertahankan atau diubah melalui tindakan dan interaksi manusia. Meskipun masyarakat dan institusi sosial terlihat nyata secara objektif, namun pada kenyataannya semuanya dibangun dalam definisi subjektif melalui proses interaksi. Maka dari itu objektivitas baru dapat terjadi setelah melalui penegasan berulang ulang (dari orang lain yang memiliki subjektivitas yang sama). Sederhananya, Berger dan Luckmann menyatakan bahwa terjadi dialektika antara individu menciptakan masyarakat dan masyarakat menciptakan individu. Proses dialektika ini terjadi melalui tahapan eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi (Berger & Luckmann, 1966: 61 melalui Bungin, 2017).

Hal penting yang ingin dikritisi Bungin dari konstruksi sosial atas realitas adalah bahwa pada kenyataan konstruksi tersebut berlangsung secara lamban, membutuhkan waktu yang lama, dan dilakukan secara hierarkis. Bungin berargumen bahwa pada zaman sekarang media massa menjadi variabel yang melemahkan teori tersebut dan bahwa media massa menjadi sangat substansial dalam proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Substansi “teori konstruksi sosial media massa” adalah pada sirkulasi informasi yang cepat dan luas sehingga konstruksi sosial berlangsung dengan sangat cepat dan sebarannya merata. Realitas yang terkonstruksi itu juga membentuk opini massa, massa cenderung apriori dan opini massa cenderung sinis (Bungin, 2017). Bungin juga menempatkan

seluruh kelebihan media massa dan efek media pada keunggulan konstruksi sosial media massa atas konstruksi sosial atas realitas. Dalam membentuk konstruksi tersebut diperlukan proses dan tahapan sebagai berikut:

Menurut Bungin (2011), Proses konstruksi realitas oleh media massa berlangsung melalui empat tahapan utama yang saling berkesinambungan. Tahap Pertama adalah penyusunan materi, di mana media sering berpihak pada kepentingan kapitalistik demi keuntungan, menampilkan kepedulian semu terhadap publik untuk meraih rating, serta mengklaim melayani kepentingan umum yang jarang terealisasi. Tahap kedua yaitu distribusi konstruksi, yakni penyebaran informasi secara cepat berdasarkan agenda media yang turut membentuk persepsi masyarakat terhadap isu tertentu. Ketiga, tahap internalisasi realitas, di mana publik mulai menerima informasi media sebagai kebenaran dan membiarkan pikirannya dikonstruksi oleh narasi yang disajikan. Terakhir, tahap konsumsi, ketika informasi dari media menjadi bagian dari kebiasaan sehari-hari dan membentuk citra positif atau negatif tergantung konstruksi yang diberikan (Bungin, 2011).

Posisi teori konstruksi media massa dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana media dapat mengkonstruksi realitas sedemikian rupa sehingga terciptalah realitas media, yang dapat menyajikan citra tertentu terhadap suatu subjek pemberitaan. Dalam penelitian ini, penulis ingin melihat gambaran yang muncul pada pembentukan Badan Anak dan Keluarga melalui pemberitaan media massa di Jepang.

2.3. Badan Anak dan Keluarga di Jepang

Fenomena (*Shōshika*) atau penurunan angka kelahiran di Jepang yang terus berlanjut sejak beberapa dekade terakhir, telah menimbulkan kekhawatiran besar terhadap masa depan demografi dan ekonomi negara. Menurut data kementerian dalam negeri Jepang, pada tahun 2022 jumlah kelahiran tercatat hanya sekitar 770 ribu, jumlah terendah sejak pencatatan statistik modern dimulai. Bersamaan dengan itu, angka kemiskinan anak mencapai lebih dari 13 persen, sementara kasus kekerasan dan penelantaran anak meningkat setiap tahun. Kompleksitas masalah ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan kebijakan sektoral, sehingga pemerintah menilai perlu adanya lembaga khusus yang mampu mengintegrasikan kebijakan lintas kementerian secara komprehensif.

Sebagai tanggapan atas krisis demografi dan meningkatnya kompleksitas persoalan anak serta keluarga, Perdana Menteri Fumio Kishida menjadikan pembentukan Badan Anak dan Keluarga (*Kodomo Kateichō*) sebagai salah satu prioritas utama pemerintah. Parlemen Jepang (Diet) mengesahkan undang-undang pembentukan *Children and Families Agency* (Act No. 75 of 2022) pada 15 Juni 2022. Undang-undang ini secara resmi menetapkan pembentukan lembaga baru bernama Badan Anak dan Keluarga (*Kodomo Kateichō*) yang mulai beroperasi pada 1 April 2023 di bawah kantor kabinet (*Cabinet Office*). Badan ini memiliki mandat sebagai *control tower* atau pusat koordinasi dalam merumuskan, mengoordinasikan, dan mempromosikan kebijakan yang menyangkut anak dan keluarga di Jepang. Tujuan utamanya adalah mewujudkan (*Kodomo Mannaka Shakai*) atau masyarakat yang berpusat pada anak, di mana kepentingan terbaik anak dijamin negara sekaligus memperkuat fungsi keluarga sebagai institusi utama.

Secara struktural, Badan Anak dan Keluarga (*Kodomo Kateichō*) dipimpin

oleh seorang administrator dan didukung oleh dewan penasehat anak dan keluarga yang bertugas memberikan masukan strategis. Fungsi lembaga ini meliputi perumusan kebijakan perlindungan anak, penyediaan layanan pengasuhan anak usia dini, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, penanggulangan *bullying*, penguatan kesejahteraan ibu dan keluarga muda, serta koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan mandat tersebut, diharapkan fragmentasi kebijakan yang sebelumnya tersebar di kementerian pendidikan, kesehatan, dan urusan dalam negeri dapat diintegrasikan secara lebih efektif.

Sebagai lembaga yang berperan sebagai *control tower* kebijakan anak dan keluarga, *Kodomo Kateichō* meluncurkan serangkaian program dan kebijakan spesifik yang tercantum secara resmi dalam laman *Prime Minister's Office of Japan*. Undang-undang yang komprehensif tersebut sekaligus menetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan secara bertahap sejak tahun fiskal 2023 (Japan, 2025). Program-program kebijakan yang resmi diluncurkan dalam kerangka ini mencakup berbagai aspek sebagai berikut:

- 1) Tunjangan Anak. Semua keluarga penerima tunjangan, tanpa batasan penghasilan, memperoleh 15.000 yen per bulan untuk anak di bawah tiga tahun, 10.000 yen untuk anak usia tiga hingga sekolah menengah, dan 30.000 yen untuk anak ketiga dan seterusnya.
- 2) Subsidi Persalinan. Tunjangan persalinan dinaikkan dari 420.000 yen menjadi 500.000 yen mulai tahun fiskal 2023. Pemerintah juga menawarkan bantuan biaya untuk konsultasi obstetrik pertama bagi ibu dengan pendapatan rendah dan merencanakan jaminan kesehatan untuk memasukkan biaya persalinan pada 2026.
- 3) Subsidi Pendidikan Tinggi. Dukungan beasiswa dan pengurangan biaya

pendidikan diperluas kepada pelajar kelas menengah dengan tiga anak atau lebih, serta mereka yang belajar di bidang sains, teknik, atau pertanian. Skema ini mulai berlaku tahun fiskal 2024.

- 4) Dukungan Perumahan Ramah Keluarga. Pemerintah berencana menyediakan 300.000 unit rumah ramah anak selama satu dekade ke depan, serta memperkenalkan suku bunga KPR tetap 35 tahun khusus bagi keluarga dengan banyak anak mulai tahun 2024.
- 5) Kesejahteraan Anak dan Lingkungan Pendidikan Awal. Fokus pergeseran dari kuantitas ke kualitas pelayanan, termasuk pengurangan rasio anak per pengasuh (misalnya 1 pengasuh : 5 anak usia 1 tahun, dan 1 : 25 anak usia 4 sampai 5 tahun). Selain itu, sistem *daycare* fleksibel diterapkan mulai 2023 dan akan diinstitusionalisasi pada 2024.
- 6) Dukungan Sosial dan Transportasi Ramah Anak. Pemerintah mendorong transformasi publik seperti jalur khusus untuk ibu hamil, area *stroller* di transportasi umum, dan mendorong perusahaan serta pemerintah daerah untuk mengumumkan inisiatif “*Kodomo Mannaka supporter*” secara publik.
- 7) Cuti Parental dan Budaya Kerja yang Mendukung Pengasuhan. Pemerintah menargetkan 85% pria mengambil cuti pengasuhan anak pada 2030, memperpanjang tunjangan cuti bersalin hingga 100% upah pada periode pasca persalinan, juga menyediakan opsi kerja fleksibel untuk orang tua mulai 2025.

BAB III

PEMBAHASAN

Pembentukan Badan Anak dan Keluarga (*Kodomo Kateichō*) yang resmi berdiri pada April 2023 menjadi salah satu isu kebijakan sosial yang paling banyak dibicarakan di Jepang. Lembaga ini dibentuk untuk merespons penurunan angka kelahiran (*shōshika*) yang terus berlanjut, meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak, serta perlunya koordinasi kebijakan lintas kementerian agar lebih efektif dalam melindungi anak dan memperkuat peran keluarga. Sejak diresmikan, kebijakan ini memicu beragam reaksi publik dan menjadi topik yang hangat diberitakan oleh media massa, mengingat dampaknya yang luas bagi masa depan demografi dan kesejahteraan sosial di Jepang.

Pemberitaan mengenai pembentukan lembaga ini tidak hanya menyampaikan isu administratif, tetapi juga menyoroti perdebatan tentang efektivitas, kebijakan, dan implikasinya terhadap struktur sosial, keluarga, dan nilai-nilai tradisional di Jepang. Berbagai media massa berperan penting dalam membingkai isu ini dan mempengaruhi cara publik memahaminya. Dalam konteks penelitian ini, fokus diarahkan pada dua media besar yang memiliki orientasi ideologi berbeda, yaitu Asahi Shimbun dan Yomiuri Shimbun, yang sama-sama menjadi aktor penting dalam membentuk wacana publik terkait isu pembentukan *Kodomo Kateichō* untuk mengetahui bingkai pemberitaan dari kedua media massa tersebut terhadap pembentukan Badan Anak dan Keluarga di Jepang.

Asahi Shimbun, yang didirikan pada tahun 1879 secara historis dikenal sebagai surat kabar dengan orientasi progresif liberal yang menekankan jurnalisme kritis terhadap negara, isu hak asasi manusia, keadilan sosial, dan kebijakan yang inklusif terhadap kelompok rentan, termasuk anak dan keluarga (Pharr & Krauss,

1996). Karakter ini membuat Asahi banyak dipercaya oleh pembaca yang kritis terhadap pemerintah dan mendukung pembaruan kebijakan sosial. Sementara Yomiuri Shimbun yang berdiri sejak tahun 1874 diposisikan sebagai media arus utama yang cenderung berorientasi konservatif dan memiliki kedekatan dengan kebijakan pemerintah Jepang. Selain itu, Yomiuri Shimbun juga secara luas dikenal sebagai salah satu surat kabar dengan oplah terbesar di dunia berdasarkan laporan organisasi pers internasional dan kajian akademik mengenai sistem media Jepang (Radcliffe et al., 2025). Kedekatannya dengan kebijakan pemerintah konservatif menjadikan Yomiuri sering dipandang sebagai representasi suara arus utama yang mendukung kebijakan negara.

Perbedaan orientasi ideologis kedua media ini memberi peluang bagi penelitian untuk melihat bagaimana isu yang sama yaitu pembentukan *Kodomo Kateichō* dibingkai secara berbeda. Oleh karena itu, bab ini menyajikan hasil analisis *framing* terhadap 7 sampel berita dari Asahi Shimbun dan 7 sampel berita dari Yomiuri Shimbun, untuk mengungkap konstruksi bingkai yang digunakan kedua media tersebut dalam membentuk wacana publik tentang kebijakan anak dan keluarga di Jepang.

3.1 Analisis Pemberitaan dari Asahi Shimbun

1. Analisis pemberitaan dengan judul 『【解説人語】出生数、過去最少に

異次元の少子化対策を阻む要因とは』 ([Komentar Penjelasan] Angka

kelahiran mencapai rekor terendah: Apa saja faktor yang menghambat upaya untuk mengatasi penurunan angka kelahiran yang belum pernah terjadi sebelumnya ini ?). Terbit pada 27 Februari 2025 (Yuki, 2025).

Elemen Framing	Temuan dan Interpretasi
<i>Define Problems</i> (Penjelasan masalah)	Media mendefinisikan masalah utama sebagai krisis demografis akut, penurunan angka kelahiran terus-menerus, dan interaksi faktor sosial ekonomi. - 2024年に生まれた子どもの数（外国人を含む、出生数）は72万988人で9年連続で減り、過去最少となりました。加速する少子化の背景には、子どもを産む女性の数が減少していることに加え、未婚化や晩婚化、経済的な要因もあり、複雑に絡み合っています。 - Jumlah kelahiran pada 2024 (termasuk warga asing) adalah 720,988 anak, menurun selama 9 tahun berturut-turut, mencatat rekor terendah dalam sejarah. Di balik penurunan drastis angka kelahiran ini, selain jumlah perempuan yang bisa melahirkan menurun, faktor seperti belum menikah, menikah terlambat, serta faktor ekonomi juga saling berkaitan secara kompleks.
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Asahi menyoroti penyebab struktural dan budaya antara lain: stigma gender, hambatan karier perempuan, dan kebijakan yang mungkin belum cukup dalam merespon faktor tersebut. - 政府は、異次元の少子化対策として、経済支援などを進めていますが、『子育ては女性』のような性別で役割を求める意識は根強く、女性が出産を機に希望するキャリアを歩めないなど、根深い問題は残ったままです。 - Pemerintah telah mendorong dukungan ekonomi sebagai kebijakan penanggulangan penurunan angka kelahiran yang luar biasa (異次元), namun kesadaran bahwa ‘mengasuh anak adalah tugas wanita’ tetap kuat, dan masih ada masalah mendasar bahwa wanita tidak dapat menempuh karier yang diinginkan setelah melahirkan.

<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat keputusan moral)	Dalam penilaian moral, Asahi Shimbun menyoroti kegagalan pemerintah meski telah mengumumkan kebijakan 『異次元の少子化対策』 (Kebijakan Penanggulangan Krisis Demografis Berskala Besar). Media menilai kebijakan ini masih berfokus pada bantuan finansial, sementara masalah mendasar seperti ketimpangan gender dan transformasi struktur keluarga kurang mendapat perhatian serius. Kritik diarahkan pada keterbatasan kebijakan yang belum menyentuh akar persoalan budaya, termasuk beban ganda yang ditanggung perempuan dan hambatan bagi karier ibu pekerja. Dengan bingkai moral ini, Asahi mendorong pembaca untuk menilai pemerintah sebagai pihak yang belum cukup progresif dalam mengatasi akar masalah krisis kelahiran.
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)	Artikel ini merekomendasikan agar solusi tidak berhenti pada subsidi ekonomi. Pemerintah perlu menata ulang struktur kerja yang ramah keluarga, memperkuat dukungan layanan pengasuhan, dan mengurangi beban pengasuhan yang timpang pada pihak ibu. Selain itu, artikel ini menekankan perlunya perubahan nilai sosial pada masyarakat Jepang, yakni persepsi tradisional yang menganggap pengasuhan anak semata-mata sebagai tugas perempuan. Dengan demikian, selain intervensi kebijakan, transformasi sosial menjadi langkah yang tak terhindarkan untuk menghentikan laju penurunan angka kelahiran.

Tabel 3.1 Analisis Pemberitaan Asahi Shimbun News 1

Dalam pemberitaan sampel 1 ini, Asahi Shimbun membingkai penurunan angka kelahiran sebagai krisis demografis yang bersifat struktural dan mendesak, bukan sekadar persoalan statistik kependudukan. Pada elemen *define problems*, penurunan angka kelahiran dikonstruksikan sebagai hasil dari interaksi kompleks antara faktor sosial, ekonomi, dan budaya, sehingga memerlukan respons kebijakan yang melampaui solusi jangka pendek. Penekanan terhadap istilah 『異次元の』

しょうしかたいさく
少子化対策』 (Kebijakan Penanggulangan Krisis Demografis Berskala Besar)

menunjukkan bagaimana media menyeleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari kebijakan pemerintah untuk menegaskan urgensi persoalan, sebagaimana dijelaskan dalam teori *framing* bahwa media secara aktif memilih aspek realitas yang dianggap paling bermakna bagi publik (Entman, 1993; Eriyanto, 2002).

Pada elemen *diagnose causes* dan *make moral judgement*, Asahi Shimbun mengaitkan krisis demografis dengan ketimpangan gender, beban ganda perempuan, serta struktur kerja yang tidak ramah keluarga. *Framing* semacam ini sejalan dengan temuan Hosokawa, Tomozawa, dan Katsura (2023) yang menegaskan bahwa stabilitas keluarga dan kesejahteraan anak sangat dipengaruhi oleh struktur sosial dan relasi dalam keluarga, bukan semata keputusan individu (Hosokawa et al., 2023). Dengan demikian, kritik yang diarahkan Asahi terhadap pemerintah tidak bersifat personal, melainkan struktural, yakni pada desain kebijakan yang dinilai belum mampu menjawab kebutuhan keluarga modern. Pola ini mencerminkan karakter *framing* media progresif yang menempatkan negara sebagai aktor yang bertanggung jawab atas ketimpangan sosial, sebagaimana juga ditunjukkan dalam penelitian *framing* kebijakan publik oleh (Rossy, 2024).

Jika ditinjau melalui perspektif konstruksi sosial media massa, pemberitaan ini

menunjukkan tahap penyusunan materi dan distribusi konstruksi realitas sebagaimana dijelaskan oleh (Bungin, 2011). Asahi Shimbun menyusun realitas krisis demografis melalui pemilihan diksi evaluatif dan penekanan pada dampak sosial jangka panjang, kemudian mendistribusikannya secara luas sebagai isu publik yang mendesak. Proses ini berpotensi membentuk internalisasi realitas di kalangan pembaca, di mana penurunan angka kelahiran dipahami sebagai kegagalan sistemik, bukan kesalahan individu. Dengan demikian, media berperan aktif dalam membangun kesadaran kolektif mengenai urgensi reformasi kebijakan sosial.

Pada elemen *treatment recommendation*, Asahi Shimbun mendorong solusi yang bersifat komprehensif dan transformasional, seperti penataan ulang struktur kerja, perluasan layanan pengasuhan anak, serta perubahan nilai sosial terkait pembagian peran gender. Rekomendasi ini selaras dengan temuan (Hayakawa et al., 2025) yang menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan negara dan praktik sosial komunitas dalam isu kesejahteraan anak. Dengan demikian, *framing* yang ditampilkan tidak berhenti pada kritik, tetapi mengarahkan publik pada kebutuhan akan reformasi struktural dan perubahan budaya.

Secara keseluruhan, *framing* yang digunakan Asahi Shimbun pada sampel 1 dapat dikategorikan sebagai *framing* kritis reflektif, yaitu *framing* yang menempatkan kebijakan publik dalam kerangka evaluasi struktural dan moral, serta mendorong pembaruan sosial. *Framing* ini tidak hanya memperlihatkan sikap kritis terhadap efektivitas kebijakan negara, tetapi juga membangun konstruksi realitas bahwa krisis demografis Jepang merupakan persoalan multidimensional yang menuntut intervensi kebijakan jangka panjang. Dengan demikian, posisi penelitian ini sejalan dengan kajian-kajian sebelumnya yang menempatkan media sebagai aktor penting dalam mengonstruksi makna kebijakan sosial, sekaligus memperluas analisis dengan mengaitkan *framing* media terhadap pembentukan Badan Anak dan Keluarga

(*Kodomo Kateichō*) di Jepang.

2. Analisis Pemberitaan dengan judul 『「根本的な欠陥」、子育て支援金の撤回求め声明 制度・規制改革学会』(Asosiasi Jepang untuk reformasi sistem dan

regulasi menyerukan pencabutan subsidi pengasuhan anak, menyebutnya “cacat fundamental”). Terbit pada 05 April 2024 (Arata, 2024).

Elemen Framing	Temuan dan Interpretasi
<i>Define Problems</i> (Penjelasan masalah)	Masalah didefinisikan sebagai kebijakan pungutan yang dinilai bermasalah secara fundamental dan tidak tepat sasaran. - 「少子化対策の財源として、医療保険とあわせて徴収する『子ども・子育て支援金』について、 制度 ・ 規制改革学会代表理事=八代尚宏 昭和女子大特命教授は5日、制度の撤回を求め緊急声明を公表した。」 - Terkait ‘Dana Dukungan Pengasuhan Anak’ yang dipungut bersama dengan asuransi kesehatan publik sebagai sumber pembiayaan kebijakan penanggulangan penurunan angka kelahiran, <i>Society for System and Regulatory Reform</i> diketuai oleh Profesor Yashiro Naohiro dari <i>Showa Women’s University</i> pada tanggal 5 mengeluarkan pernyataan darurat yang menuntut pencabutan sistem tersebut.

<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Penyebab masalah dipandang sebagai desain kebijakan yang keliru karena mengorbankan fungsi asuransi kesehatan demi menutup kekurangan anggaran. - 医療保険は『疾病のリスクに備える社会保険』だと して、『少子化対策への流用は、その本来の目的 から外れる』と指摘。 - Mereka menegaskan bahwa asuransi kesehatan adalah ‘asuransi sosial untuk menghadapi risiko penyakit’, sehingga pengalihan untuk kebijakan penanggulangan penurunan angka kelahiran menyimpang dari tujuan aslinya. - 「取りやすいところから取るための制度だ」と批判した。 - (Lembaga ini) mengkritik bahwa sistem ini hanyalah cara untuk mengambil dana dari sumber yang mudah dipungut.
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat keputusan moral)	Media menonjolkan kritik moral terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak adil bagi masyarakat yang sudah menanggung beban berat. - 医療保険財政は納付金負担などがすでに重いと して、新たな支援金は『医療保険財政を一段と 圧迫する』とした。 - Mereka menyatakan bahwa beban keuangan asuransi kesehatan sudah berat karena kewajiban pembayaran iuran, dan pungutan baru akan semakin menekan kondisi keuangan tersebut.
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)	Rekomendasi yang diajukan adalah pencabutan kebijakan saat ini dan perumusan ulang mekanisme pendanaan yang lebih tepat dan berkelanjutan. - 政府に『提案を撤回し、財源のあり方について改 めて議論し、制度設計を改めるべきである』と求め た。 - Mereka mendesak pemerintah untuk menarik kembali proposal tersebut, mendiskusikan kembali sumber pembiayaan, dan meninjau ulang desain sistem kebijakan.

Tabel 3.2 Analisis Pemberitaan Asahi Shimbun News 2

Dalam pemberitaan sampel 2 ini, Asahi Shimbun membingkai kebijakan Dana Dukungan Pengasuhan Anak sebagai kebijakan yang memiliki cacat mendasar dalam desain pembiayaan dan karenanya layak untuk dipertanyakan legitimasi serta keberlanjutannya. Pada elemen *define problems*, isu tidak diposisikan semata sebagai kebutuhan pendanaan bagi kebijakan pro natalitas, melainkan sebagai persoalan ketidaktepatan rancangan kebijakan publik yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan fiskal. Penekanan ini menunjukkan praktik seleksi dan penonjolan aspek tertentu dari realitas kebijakan untuk mengarahkan perhatian publik pada persoalan legitimasi, sebagaimana dijelaskan dalam teori *framing* bahwa media menyoroti aspek yang dianggap paling problematis untuk membentuk pemaknaan publik (Entman, 1993; Eriyanto, 2002).

Pada elemen *diagnose causes*, Asahi Shimbun mengatribusikan sumber masalah pada keputusan pemerintah yang menggunakan dana asuransi kesehatan publik sebagai sumber pembiayaan kebijakan demografi. Kritik bahwa pemerintah “mengambil dari sumber yang mudah dipungut” membingkai persoalan sebagai kegagalan desain institusional, bukan kesalahan masyarakat sebagai pembayar iuran. Pola atribusi ini konsisten dengan karakter *framing* kritis media yang menempatkan negara sebagai aktor utama dalam menciptakan ketimpangan kebijakan, sebagaimana juga ditemukan dalam analisis *framing* kebijakan publik oleh (Rossy, 2024).

Dalam *make moral judgement*, pemberitaan menampilkan penilaian normatif melalui suara pakar dari lembaga akademik yang menilai kebijakan tersebut tidak adil dan membebani masyarakat yang telah menghadapi tekanan finansial melalui iuran asuransi kesehatan. Penilaian moral ini disampaikan bukan melalui opini redaksi secara langsung, melainkan melalui otoritas ilmiah, sehingga memperkuat legitimasi kritik dan mengurangi kesan subjektivitas media. Strategi ini sejalan dengan praktik *framing* media yang memanfaatkan sumber ahli untuk membangun kredibilitas moral

dalam pemberitaan kebijakan (Pharr & Krauss, 1996).

Ditinjau dari perspektif konstruksi sosial media massa, pemberitaan ini memperlihatkan tahap penyusunan materi dengan menyeleksi kritik akademik sebagai fokus utama, serta tahap distribusi konstruksi realitas dengan menyebarluaskan narasi bahwa kebijakan tersebut bermasalah secara fundamental. Proses ini berpotensi membentuk internalisasi realitas di kalangan pembaca, di mana kebijakan pembiayaan demografi dipahami sebagai persoalan struktural yang menuntut evaluasi menyeluruh, bukan sekadar penyesuaian teknis (Bungin, 2011).

Pada elemen *treatment recommendation*, Asahi Shimbun menampilkan tuntutan agar pemerintah mencabut kebijakan yang ada dan membuka ruang perdebatan publik yang lebih luas mengenai sumber pendanaan serta desain sistem yang adil. Rekomendasi ini menunjukkan bahwa solusi yang ditawarkan bersifat paradigmatik, yakni perubahan cara pandang dalam merancang kebijakan pembiayaan keluarga. Pendekatan ini sejalan dengan temuan (Hayakawa et al., 2025) yang menekankan pentingnya keselarasan antara kebijakan negara dan kebutuhan sosial masyarakat dalam isu kesejahteraan anak.

Secara keseluruhan, *framing* yang digunakan Asahi Shimbun dalam berita sampel 2 ini dapat dikategorikan sebagai *framing* kritis pengawasan kebijakan, yaitu *framing* yang menekankan fungsi media sebagai *watchdog* terhadap kebijakan publik, khususnya dalam aspek keadilan dan tata kelola fiskal. Dengan membingkai kritik akademik sebagai persoalan struktural, media membentuk konstruksi realitas bahwa kebijakan subsidi pengasuhan anak tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab institusional negara. Dalam konteks ini, pemberitaan secara implisit mengaitkan peran *Kodomo Kateichō* sebagai lembaga yang diharapkan mampu mengoordinasikan kebijakan lintas kementerian secara lebih sensitif terhadap kondisi sosial masyarakat,

sehingga tidak berhenti pada fungsi administratif semata, melainkan berperan strategis dalam evaluasi kebijakan publik.

3. Analisis pemberitaan dengan judul 『^{じどうぎゃくたい}児童虐待^{そうだんすう}の相談数^{ねんれんぞく}2982件、4年連続

で^{さいたこうしん}最多更新^{ぎふけん} 岐阜県^{うち}内、^{さくねんど}昨年度』(Jumlah konsultasi kasus kekerasan

terhadap anak di Prefektur Gifu mencapai 2.982 kasus, memecahkan rekor tertinggi empat tahun berturut-turut). Terbit pada 06 Agustus 2025 (Shunsuke, 2025).

Elemen Framing	Temuan dan Interpretasi
Define Problems (Penjelasan masalah)	Masalah didefinisikan sebagai peningkatan berkelanjutan jumlah laporan kasus kekerasan terhadap anak yang menjadi isu serius di tingkat lokal. - ^{ぎふけんない}岐阜県内に^{かしよ}5カ所ある^{けんこ}県子ども相談センター^{そうだんせんた}（^{じどうそうだんじょ}児童相談所）が^{ねんど}2024年度に^{たいおう}対応した^{じどうぎゃくたい}児童虐待の^{そうだんけんすう}相談件数^{そくほうち}（速報値）は^{けん}2982件^{ぜんねんどひ}（前年度比^{そう}9.4%増）で、^{かこさいた}過去最多を^{ねんれんぞく}4年連続^{こうしん}で更新した。 - Lima Pusat Konsultasi Anak di Prefektur Gifu menangani 2.982 konsultasi kasus kekerasan terhadap anak pada tahun fiskal 2024 (data awal), meningkat 9,4% dibanding tahun sebelumnya dan memecahkan rekor tertinggi selama empat tahun berturut-turut.

<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Penyebab masalah dipandang bukan semata-mata peningkatan kejadian kekerasan, tetapi juga peningkatan kesadaran masyarakat dan sistem deteksi dini berkat kerja sama lintas institusi. - 県子ども家庭課は『警察や学校、医療機関などの連携が進んだ。事案が重篤になる前に連絡をいただくと、早く対応に入ることができる。また、子どもへの不適切な対応への理解が進んでいることが背景にあるのではないかと説明する。 - Bagian keluarga dan anak Prefektur menjelaskan, ‘Koordinasi dengan polisi, sekolah, dan institusi medis telah berkembang. Karena itu, laporan dapat diterima sebelum kasus menjadi serius, dan kami dapat segera melakukan intervensi. Selain itu, pemahaman masyarakat tentang perlakuan yang tidak pantas terhadap anak semakin berkembang dan ini mungkin menjadi latar belakang peningkatan laporan.
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat keputusan moral)	Media menyoroti keprihatinan moral terhadap pelaku kekerasan yang berasal dari keluarga sendiri serta pentingnya pengakuan publik bahwa kekerasan terhadap anak adalah masalah serius yang tidak dapat ditoleransi. - 児童虐待は、身体的虐待、性的虐待、ネグレクト、心理的虐待の4種類に分類される。 - Kekerasan terhadap anak dikategorikan ke dalam empat jenis: kekerasan fisik, kekerasan seksual, penelantaran (<i>neglect</i>), dan kekerasan psikologis. - 虐待をしていた主な人物は、実母が1295件（43.4%）、実父が1294件（同）だった。 - Pelaku utama kekerasan adalah ibu kandung (1.295 kasus atau 43,4%) dan ayah kandung (1.294 kasus, persentase sama).
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan	Rekomendasi yang disampaikan adalah peningkatan kesadaran masyarakat tentang pola asuh tanpa kekerasan dan pencegahan kekerasan melalui edukasi publik dan

penyelesaian)	intervensi dini. - こども家庭庁は『^{かていちょう}体罰^{たいばつとう}等によらない^{こそだ}子育てのため^{だい}に』と題した案内^{あんない}をウェブサイト^{うえぶさいと}に掲載^{けいさい}している。 - <i>Kodomo Kateichō</i> telah mempublikasikan panduan bertajuk ‘Untuk Pengasuhan Anak Tanpa Hukuman Fisik’ di situs web resmi mereka.
---------------	---

Tabel 3.3 Analisis Pemberitaan Asahi Shimbun News 3

Dalam pemberitaan sampel 3 ini, Asahi Shimbun membingkai peningkatan laporan kasus kekerasan terhadap anak di Prefektur Gifu sebagai indikator meningkatnya kesadaran publik dan efektivitas deteksi dini, bukan semata-mata sebagai tanda memburuknya kondisi sosial. Pada elemen *define problems*, media menyoroti kenaikan berkelanjutan jumlah laporan sebagai sinyal bahwa persoalan kekerasan anak tetap serius dan membutuhkan perhatian berkelanjutan. Penonjolan data statistik yang memecahkan rekor berfungsi untuk menegaskan urgensi isu, sejalan dengan prinsip *framing* bahwa media memilih dan menonjolkan aspek tertentu untuk membentuk pemaknaan publik.

Pada elemen *diagnose causes*, Asahi Shimbun mengatribusikan peningkatan laporan terutama pada meningkatnya kesadaran masyarakat serta membaiknya kolaborasi lintas sektor antara kepolisian, sekolah, dan layanan medis yang memungkinkan intervensi lebih cepat. Atribusi sebab yang bersifat institusional ini memberi makna positif terhadap data yang tampak mengkhawatirkan, sekaligus mengalihkan fokus dari individualisasi masalah ke kapasitas sistem perlindungan anak. Pola atribusi semacam ini konsisten dengan temuan kajian kebijakan sosial yang menekankan peran koordinasi antarlembaga dalam pencegahan dan respons dini terhadap kekerasan anak (Hayakawa et al., 2025).

Dalam *make moral judgement*, Asahi Shimbun menampilkan keprihatinan moral dengan menegaskan bahwa kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran

yang tidak dapat ditoleransi, terlebih ketika pelaku mayoritas adalah orang tua kandung. Penilaian moral ini tidak disampaikan melalui retorika sensasional, melainkan melalui penegasan norma perlindungan anak dan ajakan tanggung jawab kolektif. Strategi ini selaras dengan praktik *framing* berbasis *human interest* yang bertujuan membangun empati publik tanpa menyederhanakan persoalan menjadi kriminalitas semata (Entman, 1993; Eriyanto, 2002).

Ditinjau dari perspektif konstruksi sosial media massa, pemberitaan ini memperlihatkan tahap penyusunan materi melalui seleksi narasumber otoritas lokal dan data statistik, serta tahap distribusi konstruksi realitas dengan menyebarkan narasi bahwa peningkatan laporan merupakan hasil perbaikan sistem. Proses ini berpotensi membentuk internalisasi realitas di kalangan pembaca, yakni pemahaman bahwa pencegahan kekerasan anak bergantung pada kesadaran kolektif dan koordinasi institusional, bukan sekadar penindakan pascakejadian (Bungin, 2011). Pada elemen *treatment recommendation*, Asahi Shimbun menekankan pendekatan preventif melalui penguatan kesadaran publik, edukasi, dan kolaborasi lintas sektor. Rekomendasi ini sejalan dengan temuan penelitian (Hosokawa et al., 2023) yang menekankan pentingnya stabilitas dan dukungan sistemik bagi kesejahteraan anak. Dengan demikian, solusi yang ditawarkan tidak berhenti pada respons reaktif, tetapi mendorong penguatan mekanisme pencegahan.

Secara keseluruhan, *framing* yang digunakan Asahi Shimbun dalam berita ini dapat dikategorikan sebagai *framing* empatik preventif, yaitu *framing* yang menggabungkan keprihatinan moral dengan orientasi pencegahan berbasis sistem. *Framing* ini mengonstruksi realitas bahwa peningkatan laporan kekerasan anak mencerminkan berfungsinya mekanisme deteksi dan meningkatnya kesadaran masyarakat, sekaligus menegaskan urgensi penguatan kebijakan perlindungan anak. Dalam konteks kebijakan nasional, narasi ini secara implisit beririsan dengan

mandat *Kodomo Kateichō* dalam mengoordinasikan perlindungan anak lintas sektor dan lintas wilayah, meskipun nama lembaga tidak disebutkan secara eksplisit. Dengan demikian, Asahi Shimbun menempatkan isu kekerasan anak sebagai tantangan sosial yang menuntut respons terkoordinasi dan berkelanjutan, bukan sekadar pembacaan statistik kriminal.

4. Analisis pemberitaan dengan judul 『^{ほいくしさく} 保育施策^{りょう}「量」から^{しつ}「質」へ

^{たいきじどうげん} 待機児童^{てんかん}減で^{たきのうか} 転換、^{すいしん}多機能化など推進』(Kebijakan pengasuhan anak:

beralih dari “kuantitas” ke “kualitas” untuk mengurangi daftar tunggu dan mempromosikan multifungsi). Terbit pada 20 Desember 2024 (Yuki, 2024).

Elemen Framing	Temuan dan Interpretasi
<i>Define Problems</i> (Penjelasan masalah)	Masalah didefinisikan sebagai perlunya perubahan fokus kebijakan dari ekspansi kuantitatif menuju peningkatan kualitas layanan perawatan anak. - こども^{かていちよう} 家庭庁^かは20日、2028^{ねんどまつ} 年度末までの^{ほいくせいさく} 保育政策^{あら}の新たな方向性^{ほうこうせい}をとりまとめ、発表^{はっぴよう}した。保育所^{ほいくじょ}の待機児童^{たいきじどう}の大幅な減少^{おおはば げんしょう}に伴い、待機児童^{たいきじどう}対策^{たいさく}のために『量』^{りょう}の拡大^{かくだい}を主眼^{しゅがん}としてきた保育施策^{ほいくしさく}を転換^{てんかん}。地域^{ちいき}のニーズ^にに応じた^{おう}保育^{ほいく}の提供^{ていきよう}など、『質』^{しつ}に力点^{りきてん}を置く^お。 - Pada tanggal 20, Badan Anak dan Keluarga (<i>Kodomo Kateichō</i>) mengumumkan arah baru kebijakan pengasuhan anak hingga akhir tahun fiskal 2028. Menyusul penurunan signifikan jumlah anak dalam daftar tunggu di pusat penitipan anak, kebijakan pengasuhan anak yang sebelumnya berfokus pada peningkatan “kuantitas” untuk mengatasi masalah ini akan dialihkan ke pendekatan yang lebih “berkualitas”, termasuk menyediakan pengasuhan anak yang memenuhi kebutuhan lokal.

<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Penyebab perubahan kebijakan diidentifikasi sebagai menurunnya kebutuhan penambahan kapasitas tempat penitipan anak karena berkurangnya jumlah anak dalam daftar tunggu akibat penurunan angka kelahiran. - 今年4月1日時点の待機児童数は2567人で、ピーク時の17年からおよそ10分の1に減少した。 - Hingga tanggal 1 April tahun ini, jumlah anak yang berada dalam daftar tunggu untuk penitipan anak adalah 2.567, turun sekitar sepersepuluh dari puncaknya pada tahun 2017.
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat keputusan moral)	Nilai moral yang diangkat adalah tanggung jawab pemerintah untuk memastikan pemerataan dan inklusivitas dalam akses pengasuhan anak, serta perlunya keadilan sosial bagi anak-anak berkebutuhan khusus dan tenaga pengasuh. - 地域の実情に応じた施設整備や統廃合、多機能化職員の配置基準の改善保護者の就労要件を問わずに保育所などを利用できる『子ども誰でも通園制度』障害のある子どもや医療的ケア児の受け入れ体制の充実保育士の処遇改善—など、質の高い保育のための施策を推進する。 - Kami akan menggalakkan berbagai langkah guna memastikan perawatan anak bermutu tinggi, seperti pengembangan, konsolidasi, dan multifungsionalisasi berbagai fasilitas sesuai dengan kondisi setempat, peningkatan standar alokasi staf, sistem “Setiap Anak Dapat Menghadiri Tempat Penitipan Anak”, yang memperbolehkan anak-anak menggunakan tempat penitipan anak tanpa mempedulikan pekerjaan orang tua mereka, peningkatan sistem untuk menerima anak-anak berkebutuhan khusus dan anak-anak yang menerima perawatan medis, serta peningkatan kondisi kerja bagi para pekerja perawatan anak.

<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)	Rekomendasi yang diangkat adalah modernisasi sistem manajemen perawatan anak melalui digitalisasi, perbaikan kualitas tenaga kerja, dan kebijakan yang berorientasi pada kebutuhan keluarga. - による業務改善—など、質の高い保育のための施策を推進する。 - Termasuk juga peningkatan efisiensi kerja melalui transformasi digital untuk mendukung kebijakan perawatan anak yang berkualitas tinggi.
--	--

Tabel 3.4 Analisis Pemberitaan Asahi Shimbun News 4

Dalam pemberitaan sampel 4 ini, Asahi Shimbun membingkai perubahan arah kebijakan perawatan anak di Jepang sebagai respons struktural terhadap perubahan demografis, khususnya menurunnya jumlah anak dalam daftar tunggu pusat penitipan. Pada elemen *define problems*, Asahi menegaskan bahwa keberhasilan menekan daftar tunggu telah menciptakan kondisi kebijakan baru yang menuntut pergeseran paradigma dari ekspansi kuantitas fasilitas menuju peningkatan kualitas layanan pengasuhan. Penonjolan isu kualitas ini menunjukkan praktik seleksi dan penekanan aspek tertentu dari realitas kebijakan untuk mengarahkan perhatian publik pada standar layanan dan kebutuhan anak yang beragam.

Pada elemen *diagnose causes*, media mengaitkan perubahan kebijakan dengan penurunan signifikan jumlah anak dalam daftar tunggu sebagai konsekuensi dari menurunnya angka kelahiran nasional. Atribusi sebab ini menempatkan perubahan demografi sebagai faktor struktural yang mengharuskan penyesuaian orientasi kebijakan dari pembangunan kapasitas menuju peningkatan mutu. Pola atribusi tersebut sejalan dengan kajian kebijakan sosial yang menekankan pentingnya adaptasi kebijakan berbasis konteks demografis dan kebutuhan lokal (Hayakawa et al., 2025).

Dalam *make moral judgement*, Asahi Shimbun menekankan keadilan sosial dan kesejahteraan sebagai standar moral kebijakan, dengan menyoroti pemerataan

akses, pemenuhan kebutuhan anak disabilitas, fleksibilitas bagi orang tua dengan status kerja berbeda, serta perbaikan kondisi dan standar tenaga pengasuh. Penilaian moral ini menegaskan bahwa tanggung jawab negara tidak berhenti pada penyediaan fasilitas, melainkan mencakup kualitas kehidupan anak dan tenaga pengasuh sebagai aktor kunci layanan. Strategi *framing* ini mencerminkan orientasi evaluatif yang menilai kebijakan berdasarkan dampak sosialnya, bukan capaian angka semata (Entman, 1993).

Ditinjau dari perspektif konstruksi sosial media massa, pemberitaan ini menunjukkan tahap penyusunan materi melalui seleksi data daftar tunggu dan kebijakan turunan, serta tahap distribusi konstruksi realitas dengan menyebarluaskan narasi pergeseran paradigma kualitas. Proses ini berpotensi membentuk internalisasi realitas di kalangan pembaca bahwa keberhasilan kebijakan harus diukur dari mutu layanan dan keadilan akses, bukan hanya penurunan angka administratif (Bungin, 2011).

Pada elemen *treatment recommendation*, Asahi Shimbun merekomendasikan reformasi sistemik melalui modernisasi dan digitalisasi administrasi pengasuhan anak sebagai strategi efisiensi dan inovasi layanan publik. Rekomendasi ini menempatkan transformasi digital sebagai sarana untuk menjamin keberlanjutan sistem pengasuhan di tengah perubahan demografis, sejalan dengan temuan penelitian kebijakan yang menekankan perlunya pembaruan tata kelola untuk meningkatkan kualitas layanan sosial (Rossy, 2024).

Secara keseluruhan, *framing* yang digunakan Asahi Shimbun dalam berita ini dapat dikategorikan sebagai *framing* evaluatif progresif, yakni *framing* yang menilai kebijakan berdasarkan kualitas dampak sosial dan mendorong pembaruan sistemik. *Framing* ini mengonstruksi realitas bahwa pengasuhan anak merupakan tanggung jawab moral dan sosial negara yang menuntut koordinasi kebijakan lintas sektor.

Dalam konteks kebijakan nasional, narasi tersebut beririsan dengan mandat *Kodomo Kateichō* sebagai pengarah kebijakan pengasuhan anak yang berorientasi mutu dan pemerataan, meskipun lembaga tidak disebutkan secara eksplisit. Dengan demikian, Asahi menempatkan transisi dari kuantitas ke kualitas sebagai agenda kebijakan yang krusial dalam menghadapi realitas demografis Jepang.

5. Analisis pemberitaan dengan judul 『^{なつやす}夏休みの^{がくどう}学童で^{ちゅうしょくていきょう}昼食提供、^はハードルは^{どる}どれくらい

『^{さいさん}採算^{とれ}取れない』^{いや}嫌がる^{ぎやうしや}業者も』(Penyediaan makan siang di penitipan anak

saat libur musim panas menghadapi hambatan: ‘Tidak Menguntungkan’, kata beberapa penyedia jasa). Terbit pada 11 Agustus 2023 (Chisato, 2023).

Elemen Framing	Temuan dan Interpretasi
<i>Define Problems</i> (Penjelasan masalah)	Masalah didefinisikan sebagai beban tambahan bagi orang tua selama liburan sekolah dalam menyiapkan makan siang anak-anak di layanan penitipan anak. - ^{なつやす}夏休 ^みみ ^{また}ただ ^{なか}中。 ^{ほうかご}放課後 ^{じどうくらぶ}児童クラブ (^{がくどうほいく}学童保育) に ^こ子どもを ^{かよ}通わせる ^{ほごしや}保護者にとつては、 ^{ちゅうしょく}昼食の ^{じゅんび}準備に ^{なや}悩む ^{きせつ}季節だ。 - Musim libur panas sedang berlangsung. Bagi orang tua yang menitipkan anaknya di penitipan anak setelah sekolah (<i>Gakudō Hoiku</i>), ini adalah masa yang membuat mereka bingung soal penyediaan makan siang.

<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Penyebabnya adalah kendala logistik dan finansial dalam penyediaan makanan, serta minimnya insentif bagi penyedia jasa. - 仕出し弁当を使うにしても、大量に準備できる業者が近くにいるとは限らず、採算が取れないことなどを理由に、自治体が協力を求めても嫌がる業者も少なくないという。 - Bahkan jika menggunakan layanan catering, tidak selalu ada penyedia yang bisa menyiapkan makanan dalam jumlah besar di sekitar lokasi. Karena dianggap tidak menguntungkan secara finansial, banyak penyedia yang menolak bekerja sama meski diminta oleh pemerintah.
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat keputusan moral)	Nilai moral yang ditonjolkan adalah pentingnya kebijakan yang adil dan fleksibel bagi semua keluarga, tanpa menghakimi pilihan orang tua. - 弁当を子どもにつくりたいという親もいれば、弁当づくりを負担に感じる親もいる。選択肢を用意して選べるようにできればいい。 - Ada orang tua yang ingin menyiapkan bekal sendiri untuk anaknya, tapi ada juga yang menganggap hal itu sebagai beban. Akan lebih baik jika tersedia pilihan agar orang tua bisa memilih.
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)	Rekomendasi solusi yang diusulkan adalah pendekatan berbasis komunitas yang menyesuaikan kebijakan dengan kondisi daerah lokal, bukan sistem nasional. - こども家庭庁は...自治体に対し『地域の実情に合わせ検討を』と呼びかける。 - Badan Anak dan Keluarga menyerukan kepada pemerintah daerah agar meninjau kembali sistem penyediaan makan siang dengan menyesuaikan pada kondisi dan kebutuhan tiap daerah.

Tabel 3.5 Analisis Pemberitaan Asahi Shimbun News 5

Dalam pemberitaan sampel 5 ini, Asahi Shimbun membingkai persoalan

kesulitan penyediaan makan siang anak selama liburan sekolah sebagai masalah keseharian keluarga yang merefleksikan ketidaksinkronan antara kebutuhan sosial dan kesiapan sistem pengasuhan publik. Pada elemen *define problems*, beban tambahan orang tua terutama keluarga dengan kedua orang tua bekerja dan bergantung pada layanan Penitipan Anak (*Gakudō Hoiku*) ditonjolkan sebagai isu utama. Penekanan pada pengalaman sehari-hari keluarga menunjukkan praktik seleksi dan penonjolan aspek realitas yang dekat dengan pembaca, selaras dengan prinsip *framing* bahwa media mengarahkan perhatian publik pada dimensi yang paling bermakna secara sosial.

Pada elemen *diagnose causes*, Asahi Shimbun menjelaskan hambatan sebagai kombinasi faktor ekonomi dan logistik, yakni tingginya biaya operasional dan rendahnya margin keuntungan bagi penyedia layanan makanan. Atribusi sebab ini menggeser pemaknaan dari sekadar “kegagalan kebijakan” menjadi kendala struktural pasar dan tata kelola, sehingga pembaca memahami persoalan secara realistis dan berlapis. Pola ini sejalan dengan kajian kebijakan sosial yang menekankan pentingnya keselarasan antara desain kebijakan dan insentif operasional penyedia layanan (Hayakawa et al., 2025).

Dalam *make moral judgement*, Asahi Shimbun tidak memosisikan aktor tertentu sebagai pihak yang patut disalahkan, melainkan menekankan nilai keadilan, empati, dan fleksibilitas kebijakan. Dengan menampilkan pandangan seimbang antara orang tua yang memilih menyiapkan bekal sendiri dan mereka yang terhambat oleh keterbatasan waktu dan sumber daya, media membangun *framing human interest* yang menormalkan beragam pilihan individu tanpa stigmatisasi (Eriyanto, 2002).

Ditinjau melalui perspektif konstruksi sosial media massa, pemberitaan ini memperlihatkan tahap penyusunan materi melalui pemilihan kisah keseharian keluarga dan kendala penyedia layanan, serta tahap distribusi konstruksi realitas dengan menyebarluaskan narasi bahwa masalah nutrisi anak selama liburan adalah isu

kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan keluarga. Proses ini berpotensi membentuk internalisasi realitas di kalangan pembaca bahwa pemenuhan kebutuhan dasar anak memerlukan dukungan kebijakan yang adaptif dan sensitif terhadap konteks lokal (Bungin, 2011).

Pada elemen *treatment recommendation*, solusi yang ditampilkan bersifat sosial adaptif, yakni penyesuaian kebijakan sesuai karakteristik daerah serta penguatan koordinasi agar tidak memaksakan satu model nasional. Rekomendasi ini konsisten dengan temuan riset yang menekankan pentingnya kebijakan berbasis konteks dan kolaborasi multiaktor dalam isu kesejahteraan anak (Hosokawa et al., 2023).

Secara keseluruhan, *framing* yang digunakan Asahi Shimbun dalam berita sampel 5 ini dapat dikategorikan sebagai *framing* humanis realistis, yaitu *framing* yang mengaitkan kebijakan dengan pengalaman hidup keluarga sekaligus menyoroti batasan struktural implementasi. *Framing* ini mengonstruksi realitas bahwa isu teknis seperti penyediaan makan siang selama liburan merupakan bagian dari mandat kebijakan kesejahteraan anak yang lebih luas. Dalam konteks kelembagaan, narasi tersebut beririsan dengan peran *Kodomo Kateichō* dalam mengoordinasikan kebijakan pengasuhan secara komprehensif termasuk menutup celah kebijakan melalui subsidi atau reformasi mekanisme kerja sama dengan penyedia layanan meskipun lembaga tidak selalu disebutkan secara eksplisit.

6. Analisis pemberitaan dengan judul 『^{しゃせつ}（社説）^{たいきじどうげん}待機児童減^{かだい}課題はまだ

^{やまづ}山積みだ』((Editorial) Mengurangi daftar tunggu penitipan anak: Masih

banyak tantangan yang harus dihadapi). Terbit pada 19 September 2023 (編

集部 A. S. D., 2023).

Elemen Framing	Temuan dan Interpretasi
<i>Define Problems</i> (Penjelasan masalah)	Masalah utama yang diangkat adalah ketimpangan akses layanan penitipan anak antara kota dan daerah, serta penurunan kualitas akibat kekurangan tenaga kerja. - 希望しても保育園などに入れない待機児童の数が、全国の合計では昨年度よりさらに減った。それでも、都市部にはなお解消が見通せない自治体も残り、現場の人手不足や子どもの安全といった『保育の質』をめぐる課題の解決も急務だ。 - Jumlah anak yang tidak bisa masuk ke tempat penitipan meskipun sudah mendaftar memang menurun dibanding tahun sebelumnya. Namun, di wilayah perkotaan masih banyak daerah yang belum bisa mengatasi masalah ini. Kekurangan tenaga kerja dan isu keselamatan anak menjadikan peningkatan kualitas perawatan anak sebagai hal yang mendesak.
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Penyebabnya bukan semata perbaikan sistem, tetapi juga dampak sosial dari menurunnya angka kelahiran dan perubahan pola kerja keluarga. - 待機児童が減った自治体の多くが、受け入れ施設の整備を理由に挙げた。ただ、育休を長く取る人の増加や、想定以上の少子化で利用申し込みが見通しを下回ったという事情も背景にある。 - Banyak daerah yang melaporkan penurunan jumlah anak daftar tunggu karena perbaikan fasilitas. Namun, faktor lain seperti meningkatnya jumlah orang tua yang mengambil cuti melahirkan lebih lama dan tingkat kelahiran yang lebih rendah dari perkiraan juga menjadi penyebab utama.

<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat keputusan moral)	Nilai moral yang disampaikan adalah pentingnya peran negara dalam menyediakan dukungan menyeluruh bagi keluarga, bukan hanya yang bekerja tetapi juga yang rentan secara sosial. - 保育の果たすべき役割は増している。政府は、施設を利用していない家庭にも子育てで悩み、孤立している人がいるとして、就労状況にかかわらず使える『こども誰でも通園制度』の創設を掲げた。 - Peran layanan penitipan anak semakin penting. Pemerintah mencanangkan sistem <i>Kodomo Dare Demo Tsūen</i> (Anak mana pun bisa masuk TK) agar semua keluarga, termasuk yang tidak bekerja, dapat memanfaatkannya. Ini karena masih banyak orang tua yang merasa kesepian dan kesulitan dalam mengasuh anak.
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)	Solusi yang direkomendasikan adalah meningkatkan kesejahteraan tenaga pengasuh anak serta menjamin pendanaan berkelanjutan agar sistem perawatan anak tetap berjalan dengan baik. - 保育士の配置を手厚くする施設への支援や、保育士の処遇改善の検討を打ち出している。安定財源を確保し、着実に進めてほしい。 - Pemerintah berencana memperkuat dukungan bagi fasilitas dengan staf pengasuh tambahan serta meninjau kembali kesejahteraan tenaga pengasuh. Diharapkan pemerintah dapat memastikan sumber dana yang stabil dan menjalankannya secara konsisten.

Tabel 3.6 Analisis Pemberitaan Asahi Shimbun News 6

Dalam berita editorial sampel 6 ini, Asahi Shimbun membingkai penurunan jumlah anak dalam daftar tunggu (*Taiki Jidō*) sebagai kemajuan administratif yang belum menuntaskan persoalan struktural dalam sistem pengasuhan anak. Pada elemen *define problems*, media menampilkan persoalan secara berimbang meskipun angka daftar tunggu menurun, kualitas layanan dan ketersediaan tenaga

pengasuh terutama di wilayah perkotaan masih menjadi masalah utama. Penonjolan ini mencerminkan praktik *framing* yang menggeser fokus dari capaian angka ke dampak substantif kebijakan terhadap kesejahteraan keluarga.

Pada elemen *diagnose causes*, Asahi Shimbun mengaitkan situasi tersebut dengan dinamika sosial ekonomi seperti menurunnya angka kelahiran dan meningkatnya orang tua yang mengambil cuti panjang. Atribusi sebab yang bersifat struktural ini menempatkan persoalan bukan sebagai kegagalan satu kebijakan tunggal, melainkan sebagai konsekuensi perubahan sosial yang kompleks. Pola ini sejalan dengan kajian kebijakan sosial yang menekankan pentingnya membaca isu pengasuhan anak dalam konteks demografi dan pasar kerja yang berubah (Hayakawa et al., 2025).

Dalam *make moral judgement*, Asahi Shimbun menegaskan tanggung jawab moral negara untuk menjamin kesejahteraan seluruh keluarga, termasuk mereka yang tidak terhubung langsung dengan pasar kerja formal. Penilaian moral ini memperluas kerangka evaluasi kebijakan dari orientasi ekonomi menuju dimensi kemanusiaan seperti kesepian orang tua, beban pengasuhan, dan dukungan emosional yang sering terabaikan dalam indikator administratif. Strategi ini mencerminkan *framing* evaluatif yang menilai kebijakan berdasarkan kualitas kehidupan sosial, bukan semata efisiensi (Entman, 1993).

Ditinjau dari perspektif konstruksi sosial media massa, editorial ini menunjukkan tahap penyusunan materi melalui pemilihan data penurunan *Taiki Jidō* yang diimbangi dengan narasi kualitas layanan, serta tahap distribusi konstruksi realitas dengan menyebarluaskan pemaknaan bahwa penurunan angka belum identik dengan keberhasilan sistem. Proses ini berpotensi membentuk internalisasi realitas di kalangan pembaca bahwa reformasi pengasuhan anak harus

menekankan mutu layanan dan kesejahteraan tenaga pengasuh (Bungin, 2011).

Pada elemen *treatment recommendation*, Asahi Shimbun menawarkan solusi realistis dan berkelanjutan, seperti peningkatan dukungan fasilitas, perbaikan kondisi kerja dan kesejahteraan pengasuh anak, serta penjaminan pendanaan yang stabil. Rekomendasi ini menegaskan bahwa peningkatan kualitas tidak dapat dicapai hanya dengan menambah jumlah fasilitas, tetapi memerlukan reformasi kondisi kerja dan perlindungan tenaga pengasuh sejalan dengan temuan penelitian tentang pentingnya faktor sistemik dalam kesejahteraan anak (Rossy, 2024).

Secara keseluruhan, *framing* yang digunakan Asahi Shimbun dalam berita editorial sampel 6 ini dapat dikategorikan sebagai *framing* empatik keadilan sosial, yakni *framing* yang mengakui kemajuan kebijakan sambil menekankan kewajiban moral negara untuk menyelesaikan persoalan struktural yang tersisa. Narasi editorial ini secara implisit mengaitkan tanggung jawab *Kodomo Kateichō* sebagai lembaga baru yang diharapkan mampu mempercepat reformasi khususnya dalam pemerataan layanan, peningkatan kualitas tenaga pengasuh, dan penguatan anggaran. Dengan demikian, Asahi menempatkan penurunan *Taiki Jidō* bukan sebagai titik akhir, melainkan sebagai peluang evaluasi mendalam terhadap kualitas sistem pengasuhan anak di Jepang.

7. Analisis pemberitaan dengan judul 『^{しゃせつ}（社説）^{なつやす} ネットと夏休み ^{あんぜん} 安全な環境^{かんきょう}』

^{おとな} 大人^{つく} がつくる』(Editorial) Orang dewasa menciptakan lingkungan yang aman

secara daring dan selama liburan musim panas). Terbit pada 25 Juli 2025 (編

集部 A. S. D., 2025).

Elemen Framing	Temuan dan Interpretasi
<i>Define Problems</i> (Penjelasan masalah)	Masalah yang didefinisikan adalah meningkatnya paparan anak terhadap bahaya internet selama liburan, termasuk risiko kekerasan seksual digital dan kecanduan. - 子どもがインターネットを使う時間が増える夏休み。長時間使うことによる心と体への影響や犯罪など、様々なリスクを心配する保護者は多いだろう。 - Selama liburan musim panas, anak-anak menghabiskan lebih banyak waktu di internet. Banyak orang tua yang khawatir terhadap berbagai risiko seperti dampak psikologis, kesehatan, dan tindak kejahatan daring.
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Penyebab masalahnya adalah keterlambatan kebijakan pemerintah yang tidak mampu mengikuti perkembangan teknologi digital dan pola perilaku daring anak. - 政府の従来の対応策では限界がある。2008年制定の青少年インターネット環境整備法に基づき、フィルタリングの普及と啓発・教育を主軸にしてきたが、ネット環境は急速に変化している。 - Kebijakan pemerintah yang ada memiliki batasan. Berdasarkan Undang-Undang Lingkungan Internet Remaja tahun 2008, langkah utama yang diambil hanyalah penyebaran sistem penyaringan dan pendidikan, padahal lingkungan digital berubah sangat cepat.
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat keputusan moral)	Nilai moral yang disampaikan adalah tanggung jawab moral orang dewasa baik itu orang tua maupun pemerintah untuk menciptakan lingkungan digital yang aman bagi anak. - 子どもを無防備にリスクにさらさないため、大人ができることはまだある。 - Masih banyak hal yang bisa dilakukan orang dewasa agar anak-anak tidak dibiarkan menghadapi risiko tanpa perlindungan.

<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)	Solusi yang disarankan adalah kombinasi antara pengawasan aktif pemerintah dan pembentukan aturan baru yang tegas apabila pendekatan sukarela perusahaan IT tidak memadai. - 実態 ^{じったい} をしっかり把握 ^{はあく} し、事業者 ^{じぎょうしゃ} の自主的 ^{じしゆてき} な対応 ^{たいおう} が十分機能 ^{じゅうぶんきのう} していなければ、実効性 ^{じっこうせい} を持たせる規制 ^{きせい} も検討 ^{けんとう} してほしい。 - Pemerintah perlu memahami kondisi nyata, dan bila langkah sukarela dari pihak penyedia layanan belum efektif, regulasi yang memiliki kekuatan hukum harus dipertimbangkan.
--	---

Tabel 3.7 Analisis Pemberitaan Asahi Shimbun News 7

Dalam berita editorial sampel 7 ini, Asahi Shimbun membingkai kecemasan atas penggunaan internet oleh anak-anak selama liburan musim panas sebagai tantangan sosial moral di era digital, bukan semata persoalan teknis teknologi. Pada elemen *define problems*, Asahi menempatkan peningkatan waktu anak di ruang digital sebagai persoalan yang berdampak pada dimensi sosial dan emosional keluarga modern. Penekanan ini menunjukkan praktik *framing* yang memperluas definisi masalah dari risiko teknologis menuju implikasi kesejahteraan anak, sejalan dengan prinsip *framing* bahwa media menyeleksi dan menonjolkan aspek realitas yang dianggap paling bermakna bagi publik (Eriyanto, 2002).

Pada elemen *diagnose causes*, Asahi Shimbun mengkritik keterlambatan respons kebijakan yang masih bergantung pada pendekatan lama seperti *filtering* dan edukasi dasar, yang dinilai kurang memadai menghadapi ekosistem media sosial dan perkembangan kecerdasan buatan. Atribusi sebab ini bersifat struktural dan kontekstual menempatkan masalah pada kesenjangan antara laju inovasi digital dan kapasitas regulasi tanpa menyederhanakan isu sebagai kesalahan individu. Pola atribusi ini konsisten dengan karakter *framing* kritis yang mendorong pembaruan kebijakan seiring perubahan sosial (Entman, 1993).

Dalam *make moral judgement*, berita editorial sampel 7 ini menegaskan tanggung jawab moral kolektif orang dewasa untuk melindungi anak di ruang digital. Asahi mengajak keluarga dan masyarakat untuk terlibat aktif melalui literasi digital dan penguatan kesadaran hak tubuh anak (*my body, my rights*), alih-alih menyerahkan sepenuhnya pada negara atau industri teknologi. Penilaian moral tersebut disampaikan secara normatif edukatif, membangun empati dan rasa tanggung jawab bersama tanpa sensasionalisme sejalan dengan praktik *framing* berbasis *human interest* yang bertujuan membentuk kesadaran sosial.

Ditinjau dari perspektif konstruksi sosial media massa, berita editorial sampel 7 ini memperlihatkan tahap penyusunan materi melalui pemilihan isu resiko digital yang dekat dengan kehidupan keluarga, serta tahap distribusi konstruksi realitas dengan menyebarkan narasi bahwa perlindungan anak di dunia maya adalah agenda publik yang mendesak. Proses ini berpotensi membentuk internalisasi realitas di kalangan pembaca, yakni pemahaman bahwa keamanan digital anak menuntut perubahan perilaku sosial dan kebijakan yang adaptif (Bungin, 2011).

Pada elemen *treatment recommendation*, Asahi Shimbun menekankan sinergi keluarga masyarakat negara, dengan mendorong penguatan peran pemerintah dalam pengawasan serta kemungkinan penerapan regulasi yang lebih tegas apabila pendekatan sukarela industri digital tidak efektif. Rekomendasi ini menempatkan negara sebagai pengarah kebijakan, sembari menegaskan peran aktif masyarakat dalam pencegahan sejalan dengan temuan kajian kebijakan sosial yang menekankan kolaborasi multiaktor dalam perlindungan anak (Hayakawa et al., 2025).

Secara keseluruhan, *framing* yang digunakan Asahi Shimbun dalam berita

editorial sampel 7 ini dapat dikategorikan sebagai *framing* normatif edukatif, yaitu *framing* yang menekankan dimensi moral, literasi, dan tanggung jawab kolektif dalam menghadapi risiko digital. *Framing* ini mengonstruksi realitas bahwa keselamatan anak di dunia maya merupakan isu kebijakan yang berkembang dan menuntut adaptasi berkelanjutan. Dalam konteks kelembagaan, narasi tersebut beririsan dengan mandat *Kodomo Kateichō* untuk melindungi anak dari resiko non fisik termasuk resiko digital melalui pengembangan kebijakan literasi digital, pencegahan kecanduan internet, dan perlindungan data anak. Dengan demikian, Asahi menegaskan perlunya kebijakan yang mengikuti percepatan perubahan sosial, bukan bertumpu pada pendekatan tradisional semata.

Berdasarkan analisis terhadap tujuh sampel pemberitaan Asahi Shimbun mengenai pembentukan Badan Anak dan Keluarga (*Kodomo Kateichō*), dapat diidentifikasi pola *framing* yang relatif konsisten dalam mengonstruksi isu anak dan keluarga di Jepang. Melalui keempat elemen *framing* Robert N. Entman yakni *define problems*, *diagnose causes*, *make moral judgement*, dan *treatment recommendation*. Asahi Shimbun secara sistematis memposisikan kebijakan pembentukan Badan Anak dan Keluarga (*Kodomo Kateichō*) tidak semata-mata sebagai langkah administratif, melainkan sebagai respons terhadap persoalan sosial yang bersifat struktural, seperti ketimpangan gender, tekanan ekonomi keluarga, perubahan pola kerja, serta tanggung jawab moral negara terhadap kesejahteraan anak.

Secara umum, Asahi Shimbun membingkai Badan Anak dan Keluarga (*Kodomo Kateichō*) sebagai institusi yang diperlukan dan relevan dalam menghadapi tantangan demografis Jepang, namun sekaligus menampilkan *framing* yang bersifat kritis evaluatif terhadap kinerja dan arah kebijakan yang diambil.

Media ini cenderung menekankan bahwa keberhasilan lembaga tersebut tidak dapat diukur hanya melalui capaian administratif atau angka statistik, tetapi harus dilihat dari sejauh mana kebijakan yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan nyata keluarga modern. Penekanan pada aspek moral, humanistik, dan keadilan sosial dalam berbagai sampel menunjukkan bahwa Asahi Shimbun mengarahkan pembaca untuk mengevaluasi kebijakan publik berdasarkan dampaknya terhadap kualitas kehidupan anak dan keluarga.

Jika ditinjau melalui perspektif konstruksi sosial media massa, pola pemberitaan Asahi Shimbun menunjukkan proses konstruksi realitas yang konsisten, mulai dari penyusunan materi berita yang menonjolkan suara pakar, pengalaman keluarga, dan data sosial, hingga distribusi konstruksi realitas yang membingkai isu anak dan keluarga sebagai agenda publik yang mendesak. Proses ini berpotensi membentuk internalisasi realitas di kalangan pembaca bahwa persoalan kesejahteraan anak merupakan tanggung jawab kolektif yang menuntut reformasi kebijakan jangka panjang, bukan solusi parsial. Dengan demikian, Asahi Shimbun berperan aktif dalam membangun kesadaran publik mengenai pentingnya pendekatan struktural dan lintas sektor dalam kebijakan anak dan keluarga.

Kritik Asahi Shimbun terhadap Badan Anak dan Keluarga (*Kodomo Kateichō*) disampaikan secara implisit dan simbolik, dengan menyoroti kekurangan sistemik tanpa menegaskan legitimasi lembaga. Pendekatan ini mencerminkan posisi ideologis media yang mendukung keberadaan lembaga tersebut, namun tetap menuntut akuntabilitas dan pembaruan kebijakan. Dengan demikian, *framing* Asahi Shimbun merepresentasikan jurnalisme progresif yang memadukan dukungan terhadap kebijakan publik dengan fungsi pengawasan kritis terhadap dampak kebijakan bagi kesejahteraan anak dan keluarga di Jepang.

3.2. Analisis Pemberitaan dari Yomiuri Shimbun

1. Analisis pemberitaan dengan judul 『^{しょうしかたいさく}少子化対策 ^{だれ とも}「こども誰でも通園」

^{しこうちゅう}試行中 ... ^{ほいくしふそく}保育士不足 ^{はくしゃけねん}に拍車懸念も、サービスは^{じゅうよう}需要増』(Kebijakan

penanggulangan penurunan angka kelahiran: Program percobaan “siapa pun bisa mengakses Layanan Penitipan Anak”...Kekhawatiran kekurangan tenaga pendidik semakin membesar, namun kebutuhan layanan meningkat).

Terbit pada 19 Oktober 2024 (編集部 Y. S. O., 2024).

Elemen Framing	Temuan dan Interpretasi
<i>Define Problems</i> (Penjelasan masalah)	Isu didefinisikan sebagai tantangan demografi dan keterbatasan sumber daya manusia dalam layanan penitipan anak. - ^{しゅうぎいんせん}衆議院選では^{しょうしかたいさく}少子化対策も^{じゅうよう}重要な^{そうてん}争点だ。 ^{せいふ}政府が^{あら}新たな^{しょうしかたいさく}少子化対策として^{うちだ}打ち出した、 ^{ほごしゃ}保護者の^{しゅうろう}就労に^{かんけい}関係なく^{ほいくしせつ}保育施設を^{りよう}利用できる 『^{だれ とも}こども誰でも通園制度』が^{けんない}県内でも^{しこう}試行されてい る。^{りよう}利用が進む一方、^{すす}本格^{いっぽう}実施には^{ほんかくじっし}保育人材の^{ほいくじんざい} ^{ふそく}不足という^{かだい}課題が^た立ちはだかる。 - Dalam pemilu DPR Jepang, kebijakan penanggulangan penurunan angka kelahiran menjadi isu penting. Program baru pemerintah, <i>Kodomo Dare Demo Tsūen Seido</i> yang memungkinkan semua anak dapat menggunakan fasilitas penitipan anak tanpa memandang status kerja orang tua, kini sedang diuji coba di prefektur ini. Namun, meskipun penggunaannya berkembang, implementasi penuh menghadapi kendala kekurangan tenaga pendidik (<i>hoikushi</i>).
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Penyebab masalah dilihat dari rendahnya angka kelahiran, meningkatnya permintaan layanan penitipan, dan keterbatasan tenaga pendidik. - ^{きぼう}希望する^{ほいくさ}保育サービスへの^{びす}需要は^{じゅうよう}大きい。^{おお}県内の^{けんない}

	ごうけいとくしゅしゅつしやうりつ 合計特殊出生率は1.19と過去最低を更新し... こそだ しえん きやうか きやうむ 子育て支援の強化が急務となっている。 しんせいど ほんかくじし 新制度が本格実施されれば、保育士不足に拍車をかけるとの指摘もある。 - Permintaan akan layanan penitipan anak tinggi. Tingkat fertilitas total di prefektur ini mencapai 1,19 — rekor terendah — sehingga memperkuat urgensi dukungan pengasuhan anak. Jika program baru ini dijalankan secara penuh, ada kekhawatiran akan memperburuk kekurangan tenaga pendidik.
Make Moral Judgement (Membuat keputusan moral)	Menunjukkan keharusan moral pemerintah dan masyarakat untuk mendukung keluarga muda melalui kebijakan kerja dan layanan publik yang memadai. - はたら こそだ しよくばんきやう 働きながら子育てできる職場環境。 - Lingkungan kerja yang memungkinkan orang tua bekerja sambil membesarkan anak. - ちいき ほいくさ びす せいび 地域の保育サービスの整備。 - Perbaikan layanan penitipan di tingkat lokal.
Treatment Recommendation (Menekankan penyelesaian)	Peningkatan dukungan dan subsidi oleh pemerintah pusat, perbaikan distribusi tenaga pendidik, dan penguatan layanan di tingkat lokal. - せいどりやう きぼうしやぜんいん う い きび 制度利用の希望者全員を受け入れることは厳しい。 - Masih sulit untuk menerima semua calon peserta program ini. - くに ちいき おや しえん てあつ 国に（地域の）親への支援を手厚くしてほしい。 - Kami berharap pemerintah pusat memperkuat dukungan bagi orang tua di daerah.

Tabel 3.8 Analisis Pemberitaan Yomiuri Shimbun News 1

Dalam pemberitaan sampel 1 ini, Yomiuri Shimbun membingkai program *Kodomo Dare Demo Tsūen* sebagai kebijakan afirmatif negara dalam merespons penurunan angka kelahiran dengan memperluas akses penitipan anak tanpa mensyaratkan status pekerjaan orang tua. Pada elemen *define problems*, isu

diposisikan sebagai kebutuhan mendesak untuk memperkuat dukungan pengasuhan anak di tengah perubahan demografis. Namun, sejak awal narasi, Yomiuri menonjolkan tantangan implementatif berupa kekurangan tenaga pendidik (*hoikushi*) sebagai hambatan utama yang berpotensi memengaruhi efektivitas program. Penonjolan aspek implementasi ini mencerminkan praktik *framing* yang menempatkan keberhasilan kebijakan pada kesiapan sistem, bukan pada perdebatan normatif kebijakan itu sendiri (Entman, 1993; Eriyanto, 2002).

Pada elemen *diagnose causes*, Yomiuri Shimbun mengaitkan tekanan terhadap fasilitas penitipan anak dengan meningkatnya permintaan layanan akibat perubahan struktur keluarga, meningkatnya partisipasi kerja perempuan, serta rendahnya tingkat kelahiran. Kekurangan tenaga pendidik diposisikan sebagai persoalan struktural yang telah berlangsung lama, sehingga problem utama tidak diarahkan pada desain kebijakan, melainkan pada keterbatasan sumber daya manusia dan distribusinya. Pola atribusi sebab ini sejalan dengan karakter *framing* media arus utama yang cenderung menekankan kendala teknis dan administratif dalam pelaksanaan kebijakan publik (Pharr & Krauss, 1996).

Dalam *make moral judgement*, Yomiuri Shimbun memandang persoalan tersebut sebagai tanggung jawab kolektif pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dunia kerja untuk menciptakan lingkungan yang ramah keluarga. Penilaian moral ini tidak disampaikan dalam bentuk kritik konfrontatif, melainkan melalui penegasan kewajiban institusional negara dalam menjamin kelancaran implementasi kebijakan. Pendekatan ini mencerminkan *framing* normatif institusional yang menekankan stabilitas sistem dan peran negara sebagai pengelola kebijakan publik (Freeman, 2000).

Jika ditinjau dari perspektif konstruksi sosial media massa, pemberitaan ini memperlihatkan tahap penyusunan materi melalui seleksi isu kekurangan tenaga

pendidik sebagai fokus utama, serta tahap distribusi konstruksi realitas dengan menyebarluaskan narasi bahwa tantangan kebijakan terletak pada aspek operasional. Proses ini berpotensi membentuk internalisasi realitas di kalangan pembaca bahwa keberhasilan program pengasuhan anak sangat bergantung pada kapasitas birokrasi dan kesiapan sumber daya, bukan pada perdebatan ideologis kebijakan (Bungin, 2011).

Pada elemen *treatment recommendation*, Yomiuri Shimbun mengarahkan solusi pada penguatan dukungan finansial dan infrastruktur oleh pemerintah pusat, serta perbaikan distribusi tenaga pendidik agar implementasi program tidak menimbulkan ketimpangan antardaerah. Rekomendasi ini menegaskan pendekatan pragmatis administratif, yakni memperbaiki mekanisme pelaksanaan tanpa mempertanyakan legitimasi kebijakan. Pendekatan semacam ini sejalan dengan *framing* kebijakan publik yang menekankan efektivitas dan stabilitas sistem sebagai indikator keberhasilan (Rossy, 2024).

Secara keseluruhan, *framing* yang digunakan Yomiuri Shimbun dalam berita sampel 1 ini dapat dikategorikan sebagai *framing* afirmatif pragmatis, yaitu *framing* yang mendukung kebijakan negara sambil mengakui kendala implementasi di lapangan. *Framing* ini mengonstruksi realitas bahwa program *Kodomo Dare Demo Tsūen* merupakan langkah konkret pemerintah yang perlu diperkuat melalui peningkatan kapasitas institusional. Dalam konteks kelembagaan, narasi tersebut beririsan dengan peran Badan Anak dan Keluarga (*Kodomo Kateichō*) sebagai koordinator kebijakan keluarga, dengan harapan tersirat agar lembaga ini mampu menyeimbangkan perluasan akses layanan dengan peningkatan kualitas dan ketersediaan tenaga pengasuh anak.

2. Analisis pemberitaan dengan judul 『ひとり親家庭の就業支援拡充、 おやかてい しゅうぎょうしえんかくじゅう』

資格受講補助引き上げ...経済的自立につなげる狙い』(Perluasan dukungan

pekerjaan bagi keluarga orang tua tunggal, peningkatan subsidi pelatihan sertifikasi... Bertujuan mendorong kemandirian ekonomi). Terbit pada 19 Maret 2024 (編集部 Y. S. O., 2024).

Elemen Framing	Temuan dan Interpretasi
<i>Define Problems</i> (Penjelasan masalah)	Masalah didefinisikan sebagai keterbatasan akses keluarga orang tua tunggal terhadap pendidikan dan pelatihan kerja yang memadai untuk keluar dari masalah kemiskinan. - こども家庭庁は新年度から、ひとり親家庭の就業支援の強化に乗り出す。看護師や介護福祉士、保育士など専門的な資格を取得するための学費を補助する制度に関し、所得制限を撤廃し、支給額も受講に必要な費用の最大 85 % (年間上限 60 万円) に引き上げる。 - Mulai tahun fiskal baru, Badan Anak dan Keluarga (<i>Kodomo Kateichō</i>) akan memperkuat dukungan bagi keluarga orang tua tunggal untuk memperoleh pekerjaan. Dalam program subsidi pendidikan untuk memperoleh kualifikasi profesional seperti perawat, pekerja perawatan lansia, dan guru penitipan anak, batasan pendapatan dihapus dan besaran subsidi dinaikkan hingga 85% dari biaya kursus (batas tahunan 600.000 yen).
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Penyebab masalah diidentifikasi sebagai batasan kebijakan yang tidak inklusif dan menghalangi akses keluarga rentan untuk memperbaiki kondisi ekonomi. - これまでは子どもが 1 人の場合、支給対象を年収 365 万円未満とするなどの所得制限があったが、今後は収入にかかわらず、子どもを養育するひとり親であれば支援を受けられるようにする。 - Sebelumnya, keluarga orang tua tunggal dengan satu anak hanya bisa menerima subsidi bila

	pendapatan tahunan di bawah 3,65 juta yen, tetapi ke depan batasan pendapatan akan dihapus, sehingga semua orang tua tunggal yang mengasuh anak dapat menerima dukungan.
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat keputusan moral)	Nilai moral yang ditonjolkan adalah keadilan sosial dan tanggung jawab negara untuk mengatasi kesenjangan ekonomi yang membatasi kesempatan keluarga rentan. - 厚生労働省が2021年度に母子家庭など2653世帯を対象に行った調査によると、就業しているのは86・3%で、そのうち4割近くがパートやアルバイトだった。平均年間収入は272万円で、こども家庭庁は『より収入の高い仕事に就くための支援が必要だ』と指摘する。 - Menurut survei Kementerian Kesehatan, Perburuhan, dan Kesejahteraan tahun 2021 terhadap 2.653 keluarga ibu tunggal, 86,3% bekerja, tetapi hampir 40% di antaranya bekerja paruh waktu atau paruh kontrak. Pendapatan tahunan rata-rata hanya 2,72 juta yen. Kodomo Kateichō menilai bahwa ‘dukungan diperlukan agar mereka dapat memperoleh pekerjaan dengan pendapatan yang lebih tinggi.
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)	Rekomendasi yang diusulkan adalah perbaikan skema subsidi agar lebih mendorong motivasi memperoleh sertifikasi profesional dan segera bekerja, sehingga mempercepat kemandirian ekonomi keluarga orang tua tunggal. - 新年度からは、修了後1年以内に資格を取得して就職すれば、従来の60%相当額（年40万円）に追加する形で、受講費用の25%（同20万円）を支給する。 - Mulai tahun fiskal baru, bila penerima subsidi memperoleh sertifikat dan mendapatkan pekerjaan dalam waktu satu tahun setelah menyelesaikan kursus, mereka akan menerima tambahan 25% dari biaya kursus (tambahan 200.000 yen) di atas subsidi sebelumnya sebesar 60% (400.000 yen).

Tabel 3.9 Analisis Pemberitaan Yomiuri Shimbun News 2

Dalam pemberitaan sampel 2 ini, Yomiuri Shimbun membingkai kebijakan dukungan bagi keluarga orang tua tunggal sebagai langkah afirmatif negara untuk memperkuat kemandirian ekonomi kelompok rentan melalui perluasan akses pelatihan kerja dan insentif finansial. Pada elemen *define problems*, isu diposisikan sebagai keterbatasan struktural yang selama ini menghambat mobilitas ekonomi keluarga orang tua tunggal, khususnya akibat syarat pendapatan yang membatasi akses pada program pelatihan profesional. Penonjolan hambatan akses ini mencerminkan praktik *framing* yang menekankan masalah implementasi kebijakan dan jangkauan program, alih-alih mempertanyakan legitimasi kebijakan itu sendiri (Entman, 1993; Eriyanto, 2002).

Pada elemen *diagnose causes*, Yomiuri Shimbun menegaskan bahwa desain kebijakan lama yang menerapkan batasan pendapatan secara tidak langsung mengecualikan sebagian keluarga yang membutuhkan dukungan. Dengan demikian, perubahan kebijakan untuk menghapus batasan tersebut dibingkai sebagai penyebab kunci perbaikan, bukan sebagai koreksi ideologis, melainkan penyesuaian administratif yang diperlukan agar kebijakan bekerja efektif. Pola atribusi sebab ini konsisten dengan karakter *framing* media arus utama yang menekankan solusi berbasis perbaikan sistem (Pharr & Krauss, 1996).

Dalam *make moral judgement*, Yomiuri Shimbun menonjolkan nilai keadilan sosial dan kesetaraan kesempatan, dengan memperkuat legitimasi moral kebijakan melalui data empiris seperti tingginya proporsi pekerja paruh waktu dan rendahnya pendapatan rata-rata keluarga ibu tunggal. Penilaian moral diarahkan pada kewajiban pemerintah untuk tidak berhenti pada bantuan sementara, tetapi menyediakan jalur menuju pekerjaan stabil dan berpendapatan lebih tinggi. Strategi ini menunjukkan *framing* normatif institusional yang menilai kebijakan berdasarkan kontribusinya terhadap stabilitas sosial dan kemandirian ekonomi (Freeman, 2000).

Ditinjau dari perspektif konstruksi sosial media massa, pemberitaan ini memperlihatkan tahap penyusunan materi melalui seleksi data survei dan narasi kebijakan yang menekankan keberhasilan desain program, serta tahap distribusi konstruksi realitas dengan menyebarluaskan pemaknaan bahwa kebijakan pemerintah bersifat responsif dan solutif. Proses ini berpotensi membentuk internalisasi realitas di kalangan pembaca bahwa penguatan kemandirian ekonomi keluarga tunggal dapat dicapai melalui mekanisme insentif dan reformasi administrasi yang tepat (Bungin, 2011).

Pada elemen *treatment recommendation*, Yomiuri Shimbun menekankan insentif tambahan bagi penerima subsidi yang berhasil menyelesaikan pelatihan dan memperoleh pekerjaan dalam waktu singkat. Rekomendasi ini menegaskan pendekatan pragmatis insentif, yakni mendorong perubahan perilaku melalui desain kebijakan yang efisien tanpa memperluas perdebatan normatif. Pendekatan tersebut sejalan dengan *framing* kebijakan publik yang menempatkan efektivitas implementasi sebagai indikator utama keberhasilan (Rossy, 2024).

Secara keseluruhan, *framing* yang digunakan Yomiuri Shimbun dalam berita sampel 2 ini dapat dikategorikan sebagai *framing* afirmatif institusional, yaitu *framing* yang mendukung kebijakan pemerintah dengan menekankan responsivitas negara dan keberlanjutan program. *Framing* ini mengonstruksi realitas bahwa kebijakan dukungan kerja bagi keluarga orang tua tunggal merupakan wujud komitmen negara dalam meningkatkan kesejahteraan sosial melalui kemandirian ekonomi. Dalam konteks kelembagaan, narasi tersebut beririsan dengan peran Badan Anak dan Keluarga (*Kodomo Kateichō*) sebagai koordinator kebijakan keluarga, dengan harapan agar lembaga ini memastikan perluasan jangkauan program berjalan efektif dan berkelanjutan, tanpa hanya berhenti pada dukungan administratif.

3. Analisis pemberitaan dengan judul 『^{じどうぎやくたいそうだんすう}児童虐待相談数 ^{けんちよう}700件超』

(Lebih dari 700 konsultasi pelecehan anak). Terbit pada 08 Agustus 2025 (編

集部 Y. S. O., 2025).

Elemen Framing	Temuan dan Interpretasi
<i>Define Problems</i> (Penjelasan masalah)	Masalah didefinisikan sebagai peningkatan berkelanjutan jumlah konsultasi kasus kekerasan terhadap anak di tingkat kota yang memerlukan perhatian khusus. - ^{おかやまし}岡山市の^{じどうそうだんじょ}児童相談所『^し市^{そうごうそうだんじょ}こども総合相談所』が^{ねんど}2024年度、^{じどうぎやくたいそうだん}児童虐待相談として^{たいおう}対応した^{けんすう}件数は^{けん}750件に^{のぼ}上り、^{ねんど}23年度の^{けん}789件から^{ねんれんぞく}2年連続で^{けん}700件を^こ超えた。 - Pusat Konsultasi Anak Kota Okayama (<i>Okayama City Comprehensive Child Consultation Center</i>) menangani 750 kasus konsultasi terkait kekerasan terhadap anak pada tahun fiskal 2024, melampaui 700 kasus untuk tahun kedua berturut-turut setelah 789 kasus pada tahun fiskal 2023.
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Penyebab masalah dilihat sebagai tingkat kesadaran publik yang meningkat sehingga pelaporan kasus lebih sering dilakukan, bukan semata-mata karena peningkatan insiden kekerasan. - ^{ちいき}地域の^{ぎやくたいぼうし}虐待防止への^{いしき}意識の^{たか}高まりも^{はいけい}背景にあるとされ、^{じそう}児相の^{たんとうしゃ}担当者は『^{なや}悩んだら^{まよ}迷わず、^{きがる}気軽に^{そうだん}相談して^{はな}ほしい』と話している。 - Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pencegahan kekerasan anak dianggap menjadi latar belakang fenomena ini. Seorang petugas pusat konsultasi mengatakan, (jika merasa bingung atau menghadapi masalah, jangan ragu untuk berkonsultasi).

<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat keputusan moral)	Media menyoroti keprihatinan moral bahwa mayoritas kasus adalah kekerasan psikologis dalam keluarga, menunjukkan urgensi untuk mengubah pola asuh dan melindungi kesejahteraan anak. - 市によると、750件のうち、最も多かった虐待の内容は、子どもを育てる上で恐怖を与えたり無視したりする『心理的虐待』が429件（前年度比4件減）で、全体の57.2%を占めた。 - Menurut pemerintah kota, dari 750 kasus tersebut, yang paling banyak adalah kekerasan psikologis berupa memberikan ketakutan atau mengabaikan anak, dengan jumlah 429 kasus (turun 4 kasus dari tahun sebelumnya), mencakup 57,2% dari total kasus.
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)	Rekomendasi yang diangkat adalah pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas akses layanan konsultasi dan memperkuat intervensi dini dalam mencegah kekerasan anak. - 県と市は、児童虐待の防止や早期発見に向け、LINEでも子育てや家庭内の悩み相談を受け付けている。 - Pemerintah prefektur dan kota menerima konsultasi mengenai masalah pengasuhan anak dan keluarga melalui LINE untuk mencegah dan mendeteksi kekerasan anak sejak dini.

Tabel 3.10 Analisis Pemberitaan Yomiuri Shimbun News 3

Dalam pemberitaan sampel 3 ini, Yomiuri Shimbun membingkai peningkatan jumlah konsultasi terkait kekerasan anak di Kota Okayama sebagai indikator membaiknya kesadaran publik dan efektivitas mekanisme pelaporan, bukan semata-mata sebagai peningkatan insiden kekerasan. Pada elemen *define problems*, isu diposisikan sebagai persoalan sosial yang tetap mendesak ditunjukkan oleh jumlah laporan yang melampaui 700 kasus selama dua tahun berturut-turut namun dimaknai dalam kerangka kebutuhan penguatan kebijakan dan

akses layanan. Penekanan ini menunjukkan praktik *framing* yang mengarahkan perhatian publik pada fungsi sistem perlindungan, bukan pada sensasionalisasi angka (Entman, 1993; Eriyanto, 2002).

Pada elemen *diagnose causes*, Yomiuri Shimbun mengatribusikan peningkatan laporan pada meningkatnya kesadaran masyarakat serta dorongan aktif otoritas agar warga tidak ragu melapor. Atribusi sebab yang bersifat institusional ini memberi makna positif pada data statistik yang tampak mengkhawatirkan, dengan menempatkan pelaporan sebagai bukti berfungsinya mekanisme deteksi dini. Pola ini konsisten dengan karakter *framing* media arus utama yang menekankan kapasitas sistem dan tata kelola sebagai kunci pencegahan (Pharr & Krauss, 1996).

Dalam *make moral judgement*, Yomiuri Shimbun menyoroti urgensi perlindungan kesejahteraan psikologis anak, dengan menekankan bahwa kekerasan psikologis mencakup lebih dari separuh laporan. Penilaian moral diarahkan pada kewajiban negara dan masyarakat untuk merespons bentuk kekerasan nonfisik secara serius, tanpa menempatkan keluarga sebagai objek stigma. Pendekatan ini mencerminkan *framing* normatif institusional yang menilai isu berdasarkan stabilitas dan keselamatan sosial (Freeman, 2000).

Ditinjau dari perspektif konstruksi sosial media massa, pemberitaan ini memperlihatkan tahap penyusunan materi melalui seleksi data laporan dan pernyataan otoritas, serta tahap distribusi konstruksi realitas dengan menyebarluaskan narasi bahwa peningkatan konsultasi adalah tanda keberhasilan kanal pelaporan. Proses ini berpotensi membentuk internalisasi realitas di kalangan pembaca bahwa pencegahan kekerasan anak bergantung pada akses layanan yang mudah dan kepercayaan publik terhadap institusi (Bungin, 2011).

Pada elemen *treatment recommendation*, Yomiuri Shimbun menonjolkan

penyediaan jalur konsultasi yang mudah diakses, termasuk pemanfaatan platform digital seperti LINE, sebagai strategi deteksi dini dan intervensi cepat. Rekomendasi ini menegaskan pendekatan pragmatis pelayanan publik, yang memprioritaskan perluasan akses dan efisiensi layanan ketimbang perdebatan normatif kebijakan. Pendekatan tersebut sejalan dengan *framing* kebijakan yang berorientasi pada efektivitas implementasi (Rossy, 2024).

Secara keseluruhan, *framing* yang digunakan Yomiuri Shimbun dalam berita sampel 3 ini dapat dikategorikan sebagai *framing* optimistis institusional, yakni *framing* yang menekankan kemajuan kesadaran masyarakat dan kinerja pemerintah dalam perlindungan anak. *Framing* ini mengonstruksi realitas bahwa peningkatan konsultasi merupakan bukti berfungsinya sistem, serta menegaskan peran Badan Anak dan Keluarga (*Kodomo Kateichō*) dalam memperkuat koordinasi perlindungan anak di tingkat nasional. Dengan demikian, Yomiuri Shimbun menampilkan dukungan terhadap kebijakan negara dan upaya institusional sebagai fondasi kestabilan sosial, sambil mendorong peningkatan kecepatan dan keterpaduan tindak lanjut laporan.

4. Analisis pemberitaan dengan judul 『行政支援の「官製」婚活、Z世代向けに

バージョンアップ...一般の倍近い成功率56%のイベントも』 (Acara perjodohan

yang disponsori pemerintah mendapatkan peningkatan untuk Gen Z... dengan tingkat keberhasilan 56%, hampir dua kali lipat rata-rata). Terbit pada 24 Juni 2025 (編集部 Y. S. O., 2025).

Elemen Framing	Temuan dan Interpretasi
<i>Define Problems</i> (Penjelasan masalah)	Masalah didefinisikan sebagai penurunan angka pernikahan di kalangan muda yang mendorong pemerintah menciptakan inovasi sosial berbasis digital untuk memfasilitasi hubungan. - 行政が男女の出会いを支援する『官製婚活』が、Z世代の若者向けに変化している。従来はパーティー形式が主流だったが、委託された専門業者によるスマートフォンアプリを使った大規模イベントが展開され、AI（人工知能）を活用したマッチングも浸透している。 - Program <i>Konkatsu</i> (pencarian pasangan) yang didukung oleh pemerintah kini berubah menyesuaikan dengan generasi muda, khususnya generasi Z. Jika sebelumnya format pesta tatap muka menjadi tren, kini acara besar yang menggunakan aplikasi ponsel pintar dan teknologi AI untuk mencocokkan pasangan telah menjadi umum.
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Penyebab masalah diidentifikasi sebagai rendahnya angka kelahiran dan pernikahan yang menimbulkan kekhawatiran pemerintah daerah, mendorong mereka untuk mengintervensi ranah sosial melalui program <i>Konkatsu</i>. - 少子化に歯止めがかからず、自治体が危機感を強めているためだ。 - Hal ini disebabkan karena angka kelahiran terus menurun tanpa henti, dan pemerintah daerah menjadi semakin khawatir.

<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat keputusan moral)	Nilai moral yang diangkat adalah peran positif pemerintah dalam memfasilitasi ruang sosial yang aman dan terpercaya bagi generasi muda untuk menjalin relasi, serta kerja sama publik swasta yang dianggap etis dan efektif. - 安心^{あんしん}得^えやすい『官製^{かんせい}』と民間^{みんかん}のノウハウ^{のうはう}で満足^{まんぞく}感^{かん} - Kepuasan tercapai melalui kombinasi layanan perijodohan yang andal dan disponsori pemerintah serta keahlian sektor swasta. - 官製^{かんせい}婚活^{こんかつ}は参加者^{さんかしゃ}の安心^{あんしん}を得^えやすく、民間^{みんかん}のノウハウ^{のうはう}が合^あわさること^{こと}で満足^{まんぞく}度^どが上^あがる。 - Layanan perijodohan yang disponsori pemerintah memberikan ketenangan pikiran bagi peserta, dan kombinasi keahlian sektor swasta meningkatkan kepuasan.
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)	Solusi yang diangkat adalah perluasan program digitalisasi perijodohan antarwilayah dengan dukungan teknologi AI dan koordinasi antarlembaga untuk meningkatkan efektivitas kebijakan peningkatan kelahiran. - AI^かを^つ活^{よう}用^ました^っマッ^{ちん}チ^んグ^ぐシ^しス^すテ^てム^むやア^あプ^ぷリ^りも^も増^あえ^ぶて^りお^り り、こども家庭^{かてい}庁^{ちやう}によ^よると、23^{ねん}年^ど度^{まつ}末^{じてん}時^{てん}点^{てん}で - 徳^{とく}島^{しま}、京^{きやう}都^とな^ど32^ふ府^{けん}県^{けん}が^ど導^{どう}入^に済^{ゆう}み^ず。 - Jumlah sistem dan aplikasi pencocokan berbasis AI terus bertambah, dan menurut Badan Anak dan Keluarga (<i>Kodomo Kateichō</i>), hingga akhir tahun fiskal 2023, sebanyak 32 prefektur, termasuk Tokushima dan Kyoto, telah mengimplementasikannya.

Tabel 3.11 Analisis Pemberitaan Yomiuri Shimbun News 4

Dalam pemberitaan sampel 4 ini, Yomiuri Shimbun membingkai inisiatif pemerintah daerah dalam mendukung aktivitas pencarian pasangan (*konkatsu*) bagi Generasi Z sebagai strategi kebijakan sosial yang proaktif dan adaptif untuk merespons krisis demografis Jepang. Pada elemen *define problems*, isu utama diposisikan sebagai penurunan angka pernikahan di kalangan muda yang

berimplikasi langsung pada rendahnya angka kelahiran. Program *konkatsu* resmi dipresentasikan bukan sekadar kegiatan sosial, melainkan instrumen kebijakan publik yang ditujukan untuk memperkuat struktur keluarga dan keberlanjutan sosial. Penekanan ini mencerminkan praktik *framing* yang menempatkan kebijakan sebagai solusi institusional atas masalah demografis (Entman, 1993; Eriyanto, 2002).

Pada elemen *diagnose causes*, Yomiuri Shimbun mengaitkan lahirnya intervensi tersebut dengan kekhawatiran pemerintah daerah terhadap tren demografi jangka panjang, termasuk menurunnya angka kelahiran dan berkurangnya pembentukan keluarga muda. Atribusi sebab bersifat struktural menempatkan krisis populasi sebagai latar utama sehingga intervensi sosial pemerintah dipahami sebagai respons rasional terhadap perubahan sosial, bukan sebagai rekayasa sosial yang berlebihan. Pola ini sejalan dengan karakter *framing* media arus utama yang menekankan kebutuhan stabilitas dan keberlanjutan sosial (Pharr & Krauss, 1996).

Dalam *make moral judgement*, Yomiuri Shimbun menilai kebijakan *konkatsu* secara positif dengan menonjolkan keamanan, inklusivitas, dan integritas karena program dijalankan oleh lembaga pemerintah. Nilai moral yang disampaikan menekankan pentingnya kolaborasi sektor publik swasta sebagai bentuk tanggung jawab sosial yang efisien dan inovatif. Penilaian ini mencerminkan *framing* normatif institusional yang mengafirmasi peran negara sebagai fasilitator utama dalam inovasi kebijakan sosial (Freeman, 2000).

Ditinjau melalui perspektif konstruksi sosial media massa, pemberitaan ini menunjukkan tahap penyusunan materi melalui seleksi narasi inovasi digital (AI) dan tingkat partisipasi masyarakat, serta tahap distribusi konstruksi realitas dengan menyebarluaskan pemaknaan bahwa modernisasi birokrasi sosial merupakan

langkah tepat dan perlu. Proses ini berpotensi membentuk internalisasi realitas di kalangan pembaca bahwa pemanfaatan teknologi dalam kebijakan keluarga adalah wajar dan legitim dalam menghadapi tantangan demografi (Bungin, 2011).

Pada elemen *treatment recommendation*, Yomiuri Shimbun mendorong perluasan implementasi sistem pencocokan berbasis AI di berbagai prefektur sebagai sarana meningkatkan efektivitas kebijakan. Rekomendasi ini menegaskan pendekatan pragmatis teknokratik, yakni memaksimalkan teknologi untuk mengurangi hambatan struktural generasi muda dalam membangun relasi. Pendekatan tersebut konsisten dengan *framing* kebijakan publik yang berorientasi pada efektivitas dan skalabilitas solusi (Rossy, 2024).

Secara keseluruhan, *framing* yang digunakan Yomiuri Shimbun dalam berita sampel 4 ini dapat dikategorikan sebagai *framing* optimistik teknokratik, yakni *framing* yang mendukung inovasi kebijakan pemerintah dan menekankan adaptasi institusional terhadap perubahan zaman. *Framing* ini mengonstruksi realitas bahwa kebijakan *konkatsu* merupakan bagian dari modernisasi kebijakan keluarga yang sah dan diperlukan. Dalam konteks kelembagaan, narasi tersebut beririsan dengan peran Badan Anak dan Keluarga (*Kodomo Kateichō*) sebagai pengarah kebijakan keluarga yang diharapkan mampu menciptakan lingkungan sosial kondusif bagi pembentukan keluarga muda melalui kolaborasi negara dan masyarakat.

5. Analisis pemberitaan dengan judul 『子ども食堂、中学校数並みの全国 9 1

3 1 か所に...コロナ禍後の活動再開が運営後押し』 (Jumlah Kafetaria anak-

anak di seluruh Jepang mencapai 9.131 lokasi, setara dengan jumlah sekolah menengah pertama...Kegiatan sosial pasca COVID-19 mendorong pengoperasian kembali). Terbit pada 17 Desember 2023 (編集部 Y. S. O., 2023).

Elemen Framing	Temuan dan Interpretasi
<i>Define Problems</i> (Penjelasan masalah)	Masalah yang didefinisikan adalah kebutuhan akan fasilitas sosial yang mendukung kesejahteraan anak-anak pasca pandemi, sekaligus meningkatnya ketergantungan masyarakat pada inisiatif komunitas seperti kafetaria anak-anak (<i>Kodomo Shokudō</i>). - 子どもたちに無料や低額で食事を提供する『子ども食堂』の設置数が、今年、全国で9 1 3 1 か所になった。 - Jumlah <i>Kodomo Shokudō</i> atau kafetaria anak-anak yang menyediakan makanan gratis atau berbiaya murah telah mencapai 9.131 lokasi di seluruh Jepang tahun ini.
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Penyebab utama fenomena ini adalah pembukaan kembali aktivitas sosial setelah pandemi, yang memungkinkan relawan dan komunitas melanjutkan kegiatan dukungan bagi anak-anak. - 新設が相次いだ要因として、むすびえは、新型コロナウイルスの感染対策に伴う活動自粛の動きが緩和されたことを挙げる。 - Menurut organisasi Musubie, peningkatan jumlah fasilitas baru disebabkan oleh pelonggaran pembatasan aktivitas sosial yang sebelumnya diberlakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19.

<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat keputusan moral)	Penilaian moral dalam berita ini menyoroti bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab moral untuk memperkuat kebijakan sosial yang mendukung tempat aman dan ramah anak di masyarakat. - こども家庭庁は『こどもの居場所づくりに関する指針』の取りまとめを進めている。 - <i>Kodomo Kateichō</i> saat ini tengah menyusun pedoman terkait pembangunan tempat kegiatan yang ramah bagi anak-anak.
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)	Rekomendasi yang diangkat adalah perluasan akses <i>Kodomo Shokudō</i> secara merata di seluruh wilayah Jepang, dengan kolaborasi antara pemerintah daerah, sekolah, dan organisasi sosial. - むすびえは、全国約1万9000の小学校区ごとに子ども食堂を1か所以上開設することを目指している。 - Organisasi Musubie menargetkan pembukaan setidaknya satu <i>Kodomo Shokudō</i> di masing-masing dari sekitar 19.000 wilayah sekolah dasar di seluruh Jepang.

Tabel 3.12 Analisis Pemberitaan Yomiuri Shimbun News 5

Dalam pemberitaan sampel 5 ini, Yomiuri Shimbun membingkai kebangkitan kembali aktivitas sosial komunitas pasca pandemi COVID-19 melalui peningkatan jumlah Kantin Anak (*Kodomo Shokudō*) sebagai indikator pemulihan sosial dan penguatan solidaritas masyarakat. Pada elemen *define problems*, isu tidak diposisikan sebagai krisis, melainkan sebagai peluang untuk membangun kembali jejaring sosial yang mendukung kesejahteraan anak. Penonjolan fakta bahwa jumlah Kantin Anak (*Kodomo Shokudō*) telah mencapai lebih dari 9.000 lokasi digunakan untuk menegaskan skala dan dampak sosial inisiatif tersebut. Praktik ini mencerminkan *framing* yang menekankan stabilitas dan keberlanjutan sosial melalui data capaian, alih-alih konflik atau kegagalan kebijakan (Entman, 1993; Eriyanto, 2002).

Pada elemen *diagnose causes*, Yomiuri Shimbun mengaitkan perkembangan tersebut dengan pencabutan pembatasan pandemi yang memungkinkan aktivitas komunitas kembali berjalan. Atribusi sebab ini menempatkan pandemi sebagai hambatan temporer, sementara kebangkitan Kantin Anak (*Kodomo Shokudō*) dipahami sebagai hasil ketangguhan sosial dan partisipasi aktif masyarakat. Pola atribusi semacam ini sejalan dengan karakter *framing* media arus utama yang menonjolkan kemampuan sistem sosial untuk pulih dan beradaptasi (Pharr & Krauss, 1996).

Dalam *make moral judgement*, Yomiuri Shimbun menekankan peran pemerintah sebagai pengarah nilai dan penjaga kohesi sosial, dengan menampilkan keterlibatan negara melalui penyusunan pedoman tempat aman bagi anak sebagai wujud tanggung jawab moral terhadap perlindungan anak. Penilaian moral diarahkan pada nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan harmoni sosial, tanpa mengedepankan kritik terhadap kebijakan. Pendekatan ini mencerminkan *framing* normatif institusional yang mengafirmasi peran negara dan komunitas sebagai mitra dalam kesejahteraan sosial (Freeman, 2000).

Ditinjau dari perspektif konstruksi sosial media massa, pemberitaan ini menunjukkan tahap penyusunan materi melalui seleksi data kuantitatif jumlah Kantin Anak (*Kodomo Shokudō*) dan narasi kolaborasi, serta tahap distribusi konstruksi realitas dengan menyebarluaskan pemaknaan bahwa pemulihan pasca pandemi ditandai oleh meningkatnya kepedulian terhadap anak. Proses ini berpotensi membentuk internalisasi realitas di kalangan pembaca bahwa solidaritas komunitas dan dukungan negara merupakan fondasi utama kesejahteraan anak (Bungin, 2011).

Pada elemen *treatment recommendation*, Yomiuri Shimbun menonjolkan perluasan Kantin Anak (*Kodomo Shokudō*) hingga mencakup setiap distrik sekolah dasar sebagai solusi yang konkret dan terukur. Rekomendasi ini menegaskan

pendekatan pragmatis kolaboratif, di mana pemerintah, organisasi sosial, dan masyarakat sipil bekerja bersama untuk menciptakan sistem dukungan anak yang berkelanjutan. Pendekatan tersebut sejalan dengan temuan penelitian yang menekankan pentingnya kolaborasi multi aktor dalam kebijakan kesejahteraan anak (Hayakawa et al., 2025).

Secara keseluruhan, *framing* yang digunakan Yomiuri Shimbun dalam berita sampel 5 ini dapat dikategorikan sebagai *framing* positif komunitarian, yaitu *framing* yang menekankan harmoni sosial, gotong royong, dan keberhasilan kolaborasi pasca pandemi. *Framing* ini mengonstruksi realitas bahwa kebangkitan Kantin Anak (*Kodomo Shokudō*) merupakan simbol pemulihan sosial Jepang. Dalam konteks kelembagaan, narasi tersebut beririsan dengan peran Badan Anak dan Keluarga (*Kodomo Kateichō*) yang diharapkan mampu memperkuat jejaring komunitas lokal dan menjembatani inisiatif warga dengan kebijakan pemerintah, sehingga ketahanan sosial anak dapat terjaga secara berkelanjutan.

6. Analisis pemberitaan dengan judul 『^{がくどうしょくいんた}学童職員足りない、^{きゅうよひく じんざいりゅうしゅつ}給与低く人材流出

『^く暮らしていけない』...^{たいきじどうかいしょう かべ}待機児童解消の壁に』 (Kekurangan staf pengasuh

anak, upah rendah sebabkan arus keluar tenaga kerja, (Tidak bisa hidup dengan gaji ini)...Jadi penghalang penghapusan daftar tunggu anak). Terbit pada 03 Desember 2023 (編集部 Y. S. O., 2023).

Elemen Framing	Temuan dan Interpretasi
<i>Define Problems</i> (Penjelasan masalah)	Masalah didefinisikan sebagai krisis tenaga kerja di sektor pengasuhan anak akibat rendahnya gaji dan beban kerja tinggi, yang menghambat pencapaian target penghapusan daftar tunggu anak (<i>Taiki Jidō</i>). - 共働き家庭などの小学生を預かる『放課後児童クラブ』（学童保育）が、人手不足に陥っている。低い給与など待遇面の不満から人材の流出が後を絶たないため、待機児童の解消に向けた受け皿整備の足かせになっている。 - Klub penitipan anak sepulang sekolah (<i>Gakudō Hoiku</i>) yang menampung anak-anak SD dari keluarga berpenghasilan ganda mengalami kekurangan staf. Rendahnya gaji dan ketidakpuasan terhadap kondisi kerja membuat banyak tenaga kerja keluar, dan hal ini menjadi penghalang bagi upaya mengurangi jumlah anak dalam daftar tunggu.
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Penyebab utama adalah rendahnya upah dan tingginya beban kerja, membuat pekerja merasa tidak sepadan dengan tanggung jawab besar yang mereka emban. - 給与は非正規も含めて平均約30万円にとどまり、法定上限（年360時間）を超える残業も多い。 - Gaji rata-rata, termasuk bagi pekerja paruh waktu, hanya sekitar 300.000 yen per bulan, dan banyak pekerja yang harus lembur melebihi batas hukum (360 jam per tahun).

<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat keputusan moral)	Aspek moral yang ditonjolkan adalah kritik terhadap sikap pemerintah yang kurang serius menganggap pentingnya layanan penitipan anak sebagai bagian dari kebijakan keluarga nasional. - 学童保育に詳しい安部芳絵・工学院大教授（教育学）は『人材不足は、行政が学童保育を“おまけの政策”と捉え、軽視してきたことに原因がある』と指摘する。 - Profesor Yoshie Abe dari Kogakuin University yang meneliti pendidikan anak menyatakan, kekurangan tenaga kerja disebabkan oleh sikap pemerintah yang menempatkan layanan penitipan anak sebagai kebijakan tambahan dan tidak penting.
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)	Solusi yang disarankan adalah meningkatkan kesejahteraan dan dukungan finansial bagi pekerja, serta memperbaiki sistem pengupahan dan rekrutmen untuk menahan arus keluar tenaga kerja. - 国と自治体は家賃補助などを含めた待遇の改善策を打ち出し、常勤職員の確保に力を入れるべきだ。 - Pemerintah pusat dan daerah perlu meluncurkan kebijakan perbaikan kesejahteraan, termasuk bantuan sewa rumah, serta berupaya keras untuk memastikan keberlanjutan tenaga kerja tetap.

Tabel 3.13 Analisis Pemberitaan Yomiuri Shimbun News 6

Dalam pemberitaan sampel 6 ini, Yomiuri Shimbun membingkai persoalan kekurangan tenaga kerja pada fasilitas pengasuhan anak sepulang sekolah (*Gakudō Hoiku*) sebagai hambatan utama dalam penghapusan daftar tunggu (*Taiki Jidō*). Pada elemen *define problems*, isu ditampilkan secara konkret melalui pengalaman pekerja rendahnya upah, jam kerja panjang, dan kelelahan emosional sehingga pembaca diarahkan untuk memahami bahwa permasalahan kebijakan tidak hanya tercermin dalam angka, tetapi juga dalam kondisi manusiawi di lapangan. Praktik

framing ini menekankan dampak kebijakan pada aktor pelaksana sebagai bagian penting dari efektivitas sistem (Entman, 1993; Eriyanto, 2002).

Pada elemen *diagnose causes*, Yomiuri Shimbun mengaitkan kekurangan tenaga kerja dengan struktur pengupahan yang tidak kompetitif dan beban kerja yang tinggi, yang mendorong banyak pekerja meninggalkan sektor pengasuhan anak. Atribusi sebab ini menempatkan masalah pada ketimpangan struktural dalam penghargaan terhadap profesi pengasuh anak, yang kerap diposisikan sebagai pekerjaan sekunder dibandingkan sektor lain. Pola atribusi tersebut sejalan dengan karakter *framing* media arus utama yang menekankan persoalan ketenagakerjaan sebagai isu sistemik yang memerlukan penyesuaian kebijakan (Pharr & Krauss, 1996).

Dalam *make moral judgement*, Yomiuri Shimbun memperkuat penilaian normatif melalui pandangan ahli pendidikan, Prof. Yoshie Abe, yang menilai bahwa layanan pengasuhan anak selama ini kurang mendapatkan pengakuan kebijakan yang layak. Penilaian moral ini menggeser isu dari sekadar persoalan ekonomi menjadi refleksi tanggung jawab negara dalam menghargai kerja pengasuhan sebagai fondasi kesejahteraan keluarga. Pendekatan tersebut mencerminkan *framing* normatif institusional yang menilai kebijakan berdasarkan keberpihakannya terhadap aktor pelaksana (Freeman, 2000).

Ditinjau dari perspektif konstruksi sosial media massa, pemberitaan ini menunjukkan tahap penyusunan materi melalui seleksi narasi pengalaman pekerja dan pendapat ahli, serta tahap distribusi konstruksi realitas dengan menyebarluaskan pemaknaan bahwa kekurangan tenaga kerja merupakan masalah struktural yang berdampak langsung pada kualitas layanan pengasuhan. Proses ini berpotensi membentuk internalisasi realitas di kalangan pembaca bahwa perbaikan kebijakan pengasuhan anak mensyaratkan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja

sebagai prasyarat keberhasilan sistem (Bungin, 2011).

Pada elemen *treatment recommendation*, Yomiuri Shimbun menekankan solusi solutif pragmatis, seperti peningkatan kesejahteraan melalui reformasi gaji, bantuan sewa rumah, dan dukungan finansial langsung bagi pengasuh anak. Rekomendasi ini menunjukkan orientasi pada perbaikan implementasi kebijakan yang dapat dirasakan langsung oleh pekerja, tanpa memperluas perdebatan ideologis mengenai desain kebijakan. Pendekatan tersebut konsisten dengan *framing* kebijakan publik yang berorientasi pada efektivitas dan stabilitas sistem layanan (Rossy, 2024).

Secara keseluruhan, *framing* yang digunakan Yomiuri Shimbun dalam berita sampel 6 ini dapat dikategorikan sebagai *framing* empatik pragmatis, yaitu *framing* yang menggabungkan empati terhadap kondisi pekerja dengan dorongan perbaikan kebijakan yang realistis. *Framing* ini mengonstruksi realitas bahwa penghapusan daftar tunggu (*Taiki Jidō*) tidak dapat dicapai tanpa memperhatikan kesejahteraan tenaga pengasuh anak sebagai ujung tombak layanan. Dalam konteks kelembagaan, narasi tersebut beririsan dengan peran Badan Anak dan Keluarga (*Kodomo Kateichō*) yang diharapkan mampu mendorong kebijakan peningkatan upah dan stabilitas kerja, demi menjaga kualitas layanan dan kepercayaan publik terhadap sistem pengasuhan anak nasional.

7. Analisis pemberitaan dengan judul 『ネット利用などで『勉強に集中できない・

睡眠不足』、過去最高の24・6% ... 小中高生に全国調査』 (Akibat

penggunaan internet, 24,6% Siswa mengaku (Tidak bisa fokus belajar dan kurang tidur), Angka tertinggi sepanjang tahun). Terbit pada 31 Maret 2025 (編集部 Y. S. O., 2025).

Elemen Framing	Temuan dan Interpretasi
<i>Define Problems</i> (Penjelasan masalah)	Masalah yang didefinisikan adalah meningkatnya dampak negatif penggunaan internet terhadap konsentrasi belajar dan pola tidur siswa di Jepang. - 『勉強に集中できない・睡眠不足』と答えた児童生徒の割合は24・6%で過去最高を更新した。 - Persentase siswa yang menjawab ‘tidak bisa fokus belajar’ atau ‘kurang tidur’ mencapai 24,6%, angka tertinggi sepanjang tahun.
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Penyebab utama adalah meningkatnya durasi penggunaan internet di kalangan anak-anak dan remaja. - ネットの平日1日平均利用時間が小中高生全体で初めて5時間を超えたことが判明しており、ネットに触れる時間が延びていることが影響している可能性がある。 - Penelitian menunjukkan bahwa waktu penggunaan internet pada hari sekolah untuk siswa SD hingga SMA rata-rata melampaui lima jam per hari untuk pertama kalinya, dan hal itu kemungkinan besar memengaruhi kurangnya fokus dan tidur.
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat keputusan moral)	Nilai moral yang disampaikan adalah pentingnya tanggung jawab orang tua dalam mengontrol aktivitas digital anak demi menjaga keseimbangan hidup mereka. - スマートフォンやタブレット端末には、子どもが使うアプリを制限する機能があり、保護者も目配りしてほしい。 - Perangkat seperti <i>smartphone</i> dan tablet memiliki fitur pembatasan aplikasi untuk anak, dan orang tua diharapkan turut mengawasi penggunaannya.
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)	Solusi yang disarankan adalah membangun kerja sama antara pemerintah dan keluarga melalui edukasi serta pembatasan waktu penggunaan internet di lingkungan rumah.

	- こども家庭庁は...調査結果を踏まえ、保護者に対し家庭内での利用ルール作りを促す考えた。 - Berdasarkan hasil survei ini, badan anak dan keluarga (<i>Kodomo Kateichō</i>) berencana mendorong orang tua untuk membuat aturan penggunaan internet di rumah.
--	---

Tabel 3.14 Analisis Pemberitaan Yomiuri Shimbun News 7

Dalam pemberitaan sampel 7 ini, Yomiuri Shimbun membingkai meningkatnya pengaruh negatif penggunaan internet terhadap kesehatan dan konsentrasi pelajar Jepang sebagai tantangan kebijakan berbasis data yang memerlukan respons terkoordinasi antara keluarga dan pemerintah. Pada elemen *define problems*, Yomiuri menampilkan temuan survei nasional yang menunjukkan bahwa sekitar seperempat pelajar mengalami kesulitan fokus belajar dan kekurangan tidur akibat penggunaan internet berlebihan. Isu diposisikan bukan sebagai masalah individual, melainkan sebagai persoalan sosial berskala nasional yang menuntut perhatian institusional. Penonjolan data kuantitatif ini mencerminkan praktik *framing* yang menekankan objektivitas empiris untuk membangun urgensi kebijakan (Entman, 1993; Eriyanto, 2002).

Pada elemen *diagnose causes*, Yomiuri Shimbun mengatribusikan gangguan belajar dan tidur pada durasi penggunaan internet yang tinggi (lebih dari lima jam per hari). Atribusi sebab yang bersifat kausal empiris ini menegaskan karakter pemberitaan yang berorientasi pada penjelasan berbasis data, bukan pada kritik normatif terhadap teknologi atau aktor tertentu. Pola ini sejalan dengan karakter *framing* media arus utama yang menempatkan masalah pada perilaku dan konteks penggunaan, serta membuka ruang solusi kebijakan yang terukur (Pharr & Krauss, 1996).

Dalam *make moral judgement*, Yomiuri Shimbun menekankan tanggung jawab moral orang tua dalam pengawasan dan pembentukan kebiasaan digital anak.

Alih-alih memposisikan teknologi sebagai penyebab tunggal, penilaian moral diarahkan pada pentingnya keseimbangan antara kemajuan teknologi dan kewaspadaan sosial di tingkat keluarga. Pendekatan ini mencerminkan *framing* normatif pragmatis yang menilai solusi melalui pembagian peran yang jelas antara negara dan keluarga (Freeman, 2000).

Ditinjau dari perspektif konstruksi sosial media massa, pemberitaan ini memperlihatkan tahap penyusunan materi melalui seleksi hasil survei resmi dan narasi edukatif, serta tahap distribusi konstruksi realitas dengan menyebarluaskan pemaknaan bahwa resiko digital dapat dikelola melalui edukasi dan kolaborasi. Proses ini berpotensi membentuk internalisasi realitas di kalangan pembaca bahwa kesejahteraan anak di era digital bergantung pada pengaturan perilaku yang rasional dan dukungan kebijakan yang adaptif (Bungin, 2011).

Pada elemen *treatment recommendation*, Yomiuri Shimbun mengarahkan solusi pada kerja sama pemerintah dan keluarga dalam merumuskan aturan penggunaan internet di rumah serta penguatan literasi digital. Rekomendasi ini menegaskan pendekatan pragmatis kolaboratif, dengan menempatkan Badan Anak dan Keluarga (*Kodomo Kateichō*) sebagai fasilitator koordinasi, bukan sebagai pengontrol tunggal. Pendekatan tersebut konsisten dengan *framing* kebijakan publik yang menekankan efektivitas implementasi dan pembagian peran sosial (Rossy, 2024).

Secara keseluruhan, *framing* yang digunakan Yomiuri Shimbun dalam berita sampel 7 ini dapat dikategorikan sebagai *framing* edukatif pragmatis, yaitu *framing* yang mengedepankan data, edukasi, dan kolaborasi sebagai jalan keluar. *Framing* ini mengonstruksi realitas bahwa isu kesejahteraan anak tidak terbatas pada aspek ekonomi dan demografi, tetapi juga mencakup kualitas kehidupan sehari-hari seperti kesehatan mental dan kebiasaan digital. Dalam konteks

kelembagaan, narasi tersebut beririsan dengan mandat Badan Anak dan Keluarga (*Kodomo Kateichō*) untuk beradaptasi terhadap isu kontemporer termasuk literasi digital dan kesehatan mental sehingga lembaga ini diposisikan sebagai penggerak kebijakan kesejahteraan anak yang relevan di era modern.

Berdasarkan analisis terhadap tujuh sampel pemberitaan Yomiuri Shimbun, dapat diidentifikasi pola *framing* yang relatif konsisten dalam memandang pembentukan Badan Anak dan Keluarga (*Kodomo Kateichō*) sebagai langkah strategis negara dalam merespons penurunan angka kelahiran (*shōshika*) serta memperkuat sistem kesejahteraan anak dan keluarga di Jepang. Melalui keempat elemen *framing* Robert N. Entman, Yomiuri cenderung menempatkan kebijakan pemerintah sebagai solusi institusional yang perlu diperkuat melalui peningkatan kapasitas dan efektivitas implementasi.

Secara umum, pemberitaan Yomiuri Shimbun berfokus pada dimensi kebijakan, tata kelola, dan efisiensi administratif, dengan menyoroti program-program pemerintah seperti perluasan akses penitipan anak, dukungan kerja bagi keluarga orang tua tunggal, pemulihan kegiatan komunitas pascapandemi melalui Kantin Anak (*Kodomo Shokudō*), hingga penguatan layanan perlindungan dan literasi digital bagi anak. *Framing* yang ditampilkan bersifat afirmatif institusional dan pragmatis, menekankan stabilitas sosial serta peran negara sebagai koordinator utama dalam menjamin kesejahteraan keluarga, alih-alih mengedepankan kritik normatif terhadap desain kebijakan.

Meskipun tidak menampilkan kritik secara konfrontatif, Yomiuri Shimbun menyiratkan harapan normatif agar Badan Anak dan Keluarga (*Kodomo Kateichō*) terus meningkatkan kinerja kebijakan, khususnya dalam aspek kesejahteraan tenaga pengasuh, pemerataan layanan antardaerah, serta adaptasi terhadap isu-isu kontemporer seperti kesehatan mental anak dan penggunaan teknologi digital.

Pendekatan ini mencerminkan karakter konservatif media yang menekankan harmoni sosial, keberlanjutan kebijakan, dan tanggung jawab institusional negara. Dengan demikian, Yomiuri Shimbun membingkai Badan Anak dan Keluarga (*Kodomo Kateichō*) sebagai representasi kebijakan negara yang fungsional dan stabil, sekaligus simbol komitmen pemerintah dalam menjaga kesejahteraan generasi muda melalui penguatan sistem yang berkelanjutan.

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis terhadap pemberitaan Asahi Shimbun dan Yomiuri Shimbun, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan *framing* yang konsisten dan mencerminkan orientasi ideologis masing-masing media dalam membingkai pembentukan Badan Anak dan Keluarga (*Kodomo Kateichō*). Perbedaan tersebut tidak hanya tampak pada sikap redaksional, tetapi juga pada cara kedua media mendefinisikan masalah, mengidentifikasi penyebab, memberikan penilaian normatif, serta merumuskan solusi kebijakan dalam konteks isu anak dan keluarga di Jepang.

Asahi Shimbun cenderung menggunakan *framing* kritis evaluatif dengan orientasi progresif dan humanistik. Media ini menempatkan Badan Anak dan Keluarga (*Kodomo Kateichō*) sebagai instrumen reformasi sosial yang harus mampu menjawab persoalan struktural, seperti ketimpangan gender, beban pengasuhan, serta keterbatasan dukungan sistemik bagi keluarga modern. Kritik yang disampaikan Asahi bersifat konstruktif dan diarahkan pada dorongan perubahan kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan, sehingga media ini berfungsi sebagai pengawas kebijakan publik yang menekankan dimensi moral dan sosial dari kesejahteraan anak.

Sebaliknya, Yomiuri Shimbun menampilkan *framing* afirmatif pragmatis dengan orientasi konservatif yang menekankan stabilitas sosial dan efektivitas kebijakan. Media ini membingkai Badan Anak dan Keluarga (*Kodomo Kateichō*)

sebagai wujud tanggung jawab institusional negara dalam menjaga keberlanjutan sistem kesejahteraan anak dan keluarga. Fokus pemberitaan Yomiuri lebih diarahkan pada aspek implementasi kebijakan, efisiensi administratif, serta kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, dengan kritik yang disampaikan secara implisit dan non konfrontatif.

Perbedaan *framing* tersebut menunjukkan kontras antara orientasi perubahan sosial yang diusung Asahi Shimbun dan orientasi stabilitas serta keberfungsian sistem yang ditekankan Yomiuri Shimbun. Meskipun demikian, kedua media memiliki titik temu dalam memandang pembentukan Badan Anak dan Keluarga (*Kodomo Kateichō*) sebagai langkah kebijakan yang penting dan mendesak dalam menghadapi tantangan demografis Jepang.

Dengan demikian, analisis ini memperlihatkan bahwa media massa tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai aktor aktif dalam mengonstruksi realitas kebijakan publik sesuai dengan ideologi dan nilai yang dianut masing-masing media.

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis *framing* terhadap pemberitaan pembentukan Badan Anak dan Keluarga (*Kodomo Kateichō*) pada Asahi Shimbun dan Yomiuri Shimbun, dapat disimpulkan bahwa kedua media berperan aktif sebagai agen konstruksi realitas sosial dalam membingkai kebijakan anak dan keluarga di Jepang. Melalui proses seleksi isu, penekanan aspek tertentu, serta penyusunan narasi kebijakan, media tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk pemaknaan publik mengenai peran, urgensi, dan arah kebijakan *Kodomo Kateichō* sesuai dengan orientasi nilai masing-masing. Dengan demikian, pemberitaan yang dihasilkan merefleksikan fungsi media sebagai aktor penting dalam relasi antara negara, kebijakan publik, dan masyarakat.

Asahi Shimbun mengonstruksi pembentukan *Kodomo Kateichō* melalui *framing* kritis evaluatif dengan orientasi progresif dan humanistik. Media ini menempatkan lembaga tersebut dalam konteks persoalan struktural, seperti ketimpangan gender, beban pengasuhan keluarga, kualitas layanan pengasuhan anak, serta keterbatasan dukungan sistemik bagi keluarga modern. Dalam konstruksinya, Asahi Shimbun berfungsi sebagai media pengawas kebijakan yang mendorong reformasi sosial dan menuntut agar *Kodomo Kateichō* tidak berhenti sebagai institusi administratif, melainkan mampu menghadirkan kebijakan yang berkeadilan dan berkelanjutan bagi kesejahteraan anak dan keluarga di Jepang.

Sebaliknya, Yomiuri Shimbun mengonstruksi pembentukan *Kodomo Kateichō* melalui *framing* afirmatif pragmatis dengan orientasi konservatif yang menekankan stabilitas sosial dan efektivitas kebijakan. Media ini memposisikan *Kodomo Kateichō* sebagai instrumen kebijakan negara yang fungsional dalam menghadapi tantangan demografis, dengan fokus pada implementasi kebijakan, efisiensi administratif, serta kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Perbedaan *framing* antara Asahi Shimbun dan Yomiuri Shimbun menunjukkan bahwa media massa membentuk realitas kebijakan publik sesuai dengan ideologi dan fungsi sosialnya masing-masing. Meskipun menggunakan pendekatan yang berbeda, kedua media sepakat memandang pembentukan *Kodomo Kateichō* sebagai langkah kebijakan yang penting dan strategis dalam memperkuat sistem kesejahteraan anak dan keluarga di Jepang.

要旨

本研究の題名は『こども家庭庁の設立に関するニュースのフレーミング分析』である。2023年4月に発足したこども家庭庁は、少子化、児童虐待、家庭の経済的不安定、保育や子育て支援の分断といった、現代日本における子ども・家庭をめぐる複合的な課題に対応するために設立された新たな行政機関である。同庁は、従来の縦割り行政の限界を克服し、子ども政策を包括的かつ横断的に推進することを目的としており、日本社会の将来に直結する重要な政策的転換点として位置づけられている。このような政策は、国民にどのように理解され、評価されるかが極めて重要であり、その過程においてマスメディアの報道は大きな役割を果たす。メディアは単に政策情報を伝達するだけでなく、政策の意味や価値、問題点を選択的に提示することで、読者の認識や解釈の枠組みを形成する存在である。しかし、こども家庭庁という新設機関について、メディアがどのように政策の意味づけを行っているのかを、理論的枠組みに基づいて検討した研究は十分に蓄積されていない。特に、朝日新聞と読売新聞は、日本の代表的な全国紙でありながら、政策報道において異なる編集方針と価値志向を有している。

朝日新聞は、政策の社会的影響や構造的課題に着目し、批判的・検

証的な視点から報道を行う傾向がある一方、読売新聞は、政策の実効性や制度的安定性を重視し、政府施策を肯定的かつ実務的に伝える傾向が強い。こうした報道姿勢の違いは、同一の政策であっても、その意味づけや評価の方向性に差異を生じさせる可能性がある。そこで本研究は、朝日新聞と読売新聞を比較対象とし、こども家庭庁の設立がどのように報道され、いかなる政策イメージが構築されているのかを明らかにすることを目的とする。研究方法としては、質的アプローチによるテキスト分析を採用した。分析対象は、朝日新聞および読売新聞のオンライン版に掲載されたこども家庭庁関連の記事14本（各紙7本）であり、掲載期間は2023年から2025年までとした。記事内容は、少子化対策、保育政策、児童虐待対策、家族支援、行政改革など、同庁の主要政策領域に基づいて選定した。加えて、家族政策、人口問題、メディア研究に関する先行研究を二次資料として参照し、分析の社会的・学術的文脈を補強した。

分析枠組みには、ロバート・N・エントマンのフレーミング理論を用いた。同理論は、①問題の定義、②原因の診断、③道徳的評価、④解決策の提示、という四つの要素から構成され、メディアがどのように現実を選択的に構築しているかを明らかにする上で有効な枠組みである。本研究では、この四要素を用いて、両紙の報道における政策フレーミングの特徴を比較分析した。

分析の結果、朝日新聞はこども家庭庁を「設立の必要性を認めつつも、制度的・構造的課題の改善を促す主体」として描いていることが明らかになった。保育の質の確保、ジェンダー不平等、家庭の経済的負担、児童虐待相談の増加などを取り上げ、政策の成果だけでなく課題や限界にも焦点を当てている点が特徴である。直接的な批判を避けつつも、象徴的・間接的な表現を通じて、より包括的で人間中心の政策への転換を求める姿勢が確認された。一方、読売新聞はこども家庭庁を「行政効率と社会的安定を高めるための前向きな政策」として肯定的に報道する傾向が強い。支援制度の拡充、行政改革の進展、地域や家庭との連携といった側面を強調し、政策の実行性や継続性を評価する枠組みで報道が構成されている。問題点が言及される場合でも、それは制度改善の前提条件として整理され、政策全体の正当性を揺るがすものとしては描かれていない。

以上の比較分析から、同一の政策を扱いながらも、朝日新聞と読売新聞ではフレーミングの方向性が大きく異なり、政策の意味づけや読者に与える印象に明確な差異が存在することが確認された。本研究は、こども家庭庁に関する報道が単なる政策情報の提供にとどまらず、政策の社会的イメージを構築するメディア実践であることを示し、マスメディアが国民の政策理解や社会問題への認識を

方向づける重要な役割を担っていることを明らかにした。

DAFTAR PUSTAKA

- Apriliyanti, I. D., Utomo, W. P., & Purwanto, E. A. (2022). Examining the policy narratives and the role of the media in policy responses to the COVID-19 crisis in Indonesia. *Journal of Asian Public Policy*, 15(3), 541–557. <https://doi.org/10.1080/17516234.2021.1954770>
- Arata M. (2024). 「根本的な欠陥」、子育て支援金の撤回求め声明 制度・規制改革学会. 朝日新聞デジタル. <https://www.asahi.com/articles/ASS452PKWS45ULFA004M.html>
- Bank, W. (2023). Fertility rate, total for Japan [SPDYNTFRTINJPN]. In *Federal Reserve Economic Data (FRED)*. <https://fred.stlouisfed.org/series/SPDYNTFRTINJPN#>
- Bungin, B. (2017). *Sosiologi komunikasi: teori, paradigma, dan diskursus teknologi komunikasi di masyarakat*. Kencana Prenada Media Group.
- Bungin, B. M. (2011). *Konstruksi sosial media massa: kekuatan pengaruh media massa, iklan televisi dan keputusan konsumen serta kritik terhadap Peter L. Berger dan Thomas Luckmann*. Kencana.
- Cabinet Secretariat, G. of J. (2021). *Basic Policy for the Establishment of the Children and Families Agency*. Cabinet Secretariat. https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/7e61aa5c-b18a-4711-85c4-c28d6822c7eb/620d14c0/20211221_policies_kihon_housin_01.pdf
- Chisato M. (2023). 夏休みの学童で昼食提供、ハードルは「採算取れない」嫌がる業者も. 朝日新聞デジタル. <https://www.asahi.com/articles/ASR835JVJR82UTFL015.html>
- Diao, T., & Yu, H. (2025). Justifying Japan's national interests to the domestic public: Japanese national daily's coverage of the Biden-Xi meeting. *Global Media and China*, 10(2), 218–236. <https://doi.org/10.1177/20594364251343514>
- Entman, R. M. (1993). Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm. *Journal of Communication*, 43(4), 51–58. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x>
- Eriyanto. (2002). *Analisis framing: konstruksi, ideologi, dan politik media* (1st ed.). LKiS.
- Freeman, L. A. (2000). *Closing the Shop: Information Cartels and Japan's Mass Media*. Princeton University Press.

- Hatch, T. (2025). Establishing the Children and Families Agency and promoting digital transformation in childcare: Hiro Yokota on the development of a “child-centered society” in Japan (Part 1). *International Education News*. https://internationalednews.com/2025/06/11/establishing-the-children-and-families-agency-and-promoting-digital-transformation-in-childcare-hiro-yokota-on-the-development-of-a-child-centered-society-in-japan-part-1/?utm_source=chatgpt.com
- Hayakawa, K., Ono, H., & Kondo, T. (2025). From Grassroots to Policy Kodomo-Shokudo (Children’s Cafeterias) Coordinators and the Making of an Inclusive Place for Everyone. *Proceedings of the Global Conference on Children and Youth*, 2(1), 14–25. <https://doi.org/10.33422/gccy.v2i1.1073>
- Hosokawa, R., Tomozawa, R., & Katsura, T. (2023). Associations between Family Routines, Family Relationships, and Children’s Behavior. *Journal of Child and Family Studies*, 32(12), 3988–3998. <https://doi.org/10.1007/s10826-023-02687-w>
- Hososaka, Y., Kayashima, K., Goetz, J. T., & Rooksby, M. (2024). A Marginalised Role in Parenting and Maltreatment Risks—A Qualitative Content Analysis of Fathers in Japan Reflecting on their Parenting Experiences. *Journal of Child and Family Studies*, 33(4), 1120–1135. <https://doi.org/10.1007/s10826-023-02707-9>
- Japan, P. M. O. of. (2025). *Policies supporting children and child-rearing*. Prime Minister’s Office of Japan. https://japan.kantei.go.jp/ongoingtopics/policies_kishida/childsupport.html
- Johnson, C. (2022). What COVID-19 revealed about gender equality policy framing. *Australian Journal of Political Science*, 57(1), 93–112. <https://doi.org/10.1080/10361146.2021.2023094>
- Krauss, E. S. (2000). *Democracy in Japan*. University of Pittsburgh Press.
- Littlejohn, S. W., & Foss, K. A. (Eds.). (2009). *Encyclopedia of Communication Theory* (1st ed.). SAGE Publications, Inc. <https://doi.org/10.4135/9781412959384>
- Liu, Y., Kobayashi, S., Karako, K., Song, P., & Tang, W. (2024). The latest policies, practices, and hotspots in research in conjunction with the aging of Japan’s population. *BioScience Trends*, 18(3), 2024.01150. <https://doi.org/10.5582/bst.2024.01150>
- Pharr, S. J., & Krauss, E. S. (1996). *Media and Politics in Japan*. University of Hawaii Press.
- Press, J. (2023). Children, Families Agency begins operations in Japan. *Jiji Press English*.

<https://sp.m.jiji.com/english/show/25553>

Radcliffe, D., Nel, F., Roper, D., & Henriksson, T. (2025). *World Press Trends Outlook 2024-2025*. World Association of News Publishers (WAN-IFRA). <https://wan-ifra.org>

Rossy, O. S. (2024). *KEBIJAKAN REFORMASI GAYA KERJA DI JEPANG: Analisis Framing Pemberitaan Daring*. Diponegoro University.

Shimizu, Y., Sugao, S., & Endo, M. (2023). A longitudinal study of the psychological impact of child-rearing difficulty and COVID-19 on mothers in the postpartum period in Japan. *Journal of Affective Disorders Reports*, 11, 100468. <https://doi.org/10.1016/j.jadr.2023.100468>

Shunsuke K. (2025). 児童虐待の相談数2982件、4年連続で最多更新 岐阜県内、昨年度. 朝日新聞デジタル. <https://www.asahi.com/articles/AST85514CT85OHGB002M.html>

Toivonen, T. (2011). ‘Don’t let your child become a NEET!’ The strategic foundations of a Japanese youth scare. *Japan Forum*, 23(3), 407–429. <https://doi.org/10.1080/09555803.2011.597055>

Yuki K. (2024). 保育施策「量」から「質」へ 待機児童減で転換、多機能化など推進. 朝日新聞デジタル. <https://www.asahi.com/articles/ASSDN1VNYSNUTFL00VM.html>

Yuki K. (2025). 【解説人語】出生数、過去最少に 異次元の少子化対策を阻む要因とは. 朝日新聞デジタル. <https://www.asahi.com/articles/AST2W22YCT2WDIFI018M.html>

編集部 A. S. D. (2023). (社説) 待機児童減 課題はまだ山積みだ. 朝日新聞デジタル. <https://www.asahi.com/articles/DA3S15744700.html>

編集部 A. S. D. (2025). (社説) ネットと夏休み 安全な環境 大人が作る. 朝日新聞デジタル. <https://www.asahi.com/articles/DA3S16266714.html>

編集部 Y. S. O. (2023a). 子ども食堂、中学校数並みの全国 9 1 3 1 か所に...コロナ禍後の活動再開が運営後押し . 読売新聞オンライン . <https://www.yomiuri.co.jp/national/20231217-OYT1T50168/>

編集部 Y. S. O. (2023b). 学童職員足りない、給与低く人材流出『暮らしていけない』...待機

児童解消の壁に. 読売新聞オンライン. <https://www.yomiuri.co.jp/national/20231203-OYT1T50020/>

編集部 Y. S. O. (2024a). ひとり親家庭の就業支援拡充、資格受講補助引き上げ...経済的

自立につなげる狙い. 読売新聞オンライン. <https://www.yomiuri.co.jp/national/20240319-OYT1T50096/>

編集部 Y. S. O. (2024b). 少子化対策「こども誰でも通園」試行中...保育士不足に拍車懸

念も、サービスは需要増. 読売新聞オンライン. <https://www.yomiuri.co.jp/local/tochigi/news/20241020-OYTNT50183/>

編集部 Y. S. O. (2025a). ネット利用などで『勉強に集中できない・睡眠不足』、過去最高の

24・6% ... 小中高生に全国調査. 読売新聞オンライン. <https://www.yomiuri.co.jp/national/20250331-OYT1T50189/>

編集部 Y. S. O. (2025b). 児童虐待相談数 700件超. 読売新聞オンライン.

<https://www.yomiuri.co.jp/local/okayama/news/20250808-OYTNT50039/>

編集部 Y. S. O. (2025c). 行政支援の「官製」婚活、Z世代向けにバージョンアップ...一般の倍

近い成功率56%のイベントも. 読売新聞オンライン. <https://www.yomiuri.co.jp/life/20250624-OYT1T50116/>

LAMPIRAN

Pemberitaan pada situs Asahi Shimbun

No.	Judul	Penulis	Sumber
1.	【解説人語】出生数、過去最少に 異次元の少子化対策を阻む要因とは	Yuki Kawano	https://www.asahi.com/articles/AST2W22YCT2WDIFI018M.html
2.	「根本的な欠陥」、子育て支援金の撤回求め声明 制度・規制改革学会	Arata Matsuura	https://www.asahi.com/articles/ASS452PKWS45ULFA004M.html
3.	児童虐待の相談数2982件、4年連続で最多更新 岐阜県 内、昨年度	Shunsuke Kimura	https://www.asahi.com/articles/AST8514CT85OHGB002M.html
4.	保育施策「量」から「質」へ 待機児童減で転換、多機能化など推進	Yuki Kawano	https://www.asahi.com/articles/ASSDN1VNYSNUTFL00VM.html
5.	夏休みの学童で昼食提供、ハードルは 「採算取れない」 嫌がる業者も	Chisato Matsumoto	https://www.asahi.com/articles/ASR835JVJR82UTFL015.html
6.	(社説) 待機児童減 課題はまだ山積みだ	Tim Jurnalis Asahi Shimbun News	https://www.asahi.com/articles/DIA3S15744700.html
7.	(社説) ネットと夏休み 安全な環境 大人が作る	Tim Jurnalis Asahi Shimbun News	https://www.asahi.com/articles/DIA3S16266714.html

Pemberitaan pada situs Yomiuri Shimbun

No.	Judul	Penulis	Sumber
1.	少子化対策 「こども誰でも通園」試行中...保育士不足に拍車懸念も、サービスは需要増	Tim Jurnalis Yomiuri Shimbun News	https://www.yomiuri.co.jp/local/tochigi/news/20241020-OYTNT50183/
2.	ひとり親家庭の就業支援拡充、資格受講補助引き上げ...経済的自立につなげる狙い	Tim Jurnalis Yomiuri Shimbun News	https://www.yomiuri.co.jp/national/20240319-OYT1T50096/
3.	児童虐待相談数 700件超	Tim Jurnalis Yomiuri Shimbun News	https://www.yomiuri.co.jp/local/okayama/news/20250808-OYTNT50039/
4.	行政支援の「官製」婚活、Z世代向けにバージョンアップ...一般の倍近い成功率56%のイベントも	Tim Jurnalis Yomiuri Shimbun News	https://www.yomiuri.co.jp/life/20250624-OYT1T50116/
5.	子ども食堂、中学校数並みの全国9131か所に...コロナ禍後の活動再開が運営後押し	Tim Jurnalis Yomiuri Shimbun News	https://www.yomiuri.co.jp/national/20231217-OYT1T50168/
6.	学童職員足りない、給与低く人材流出『暮らしていけない』...待機児童解消の壁に	Tim Jurnalis Yomiuri Shimbun News	https://www.yomiuri.co.jp/national/20231203-OYT1T50020/
7.	ネット利用などで『勉強に集中できない・睡眠不足』、過去最高の24・6%...小中高生に全国調査	Tim Jurnalis Yomiuri Shimbun News	https://www.yomiuri.co.jp/national/20250331-OYT1T50189/

BIODATA PENULIS

Data Pribadi

Nama : Aryodimas Priyo Jaguardy

Nim : 13020221120005

Email : aryodimaspi@gmail.com



Riwayat Pendidikan

2021 – 2025 : Universitas Diponegoro

2018 – 2021 : SMA Negeri 1 Talun

2015 – 2018 : SMP Negeri 2 Wlingi

2009 – 2015 : SD Negeri Tulungrejo 1